

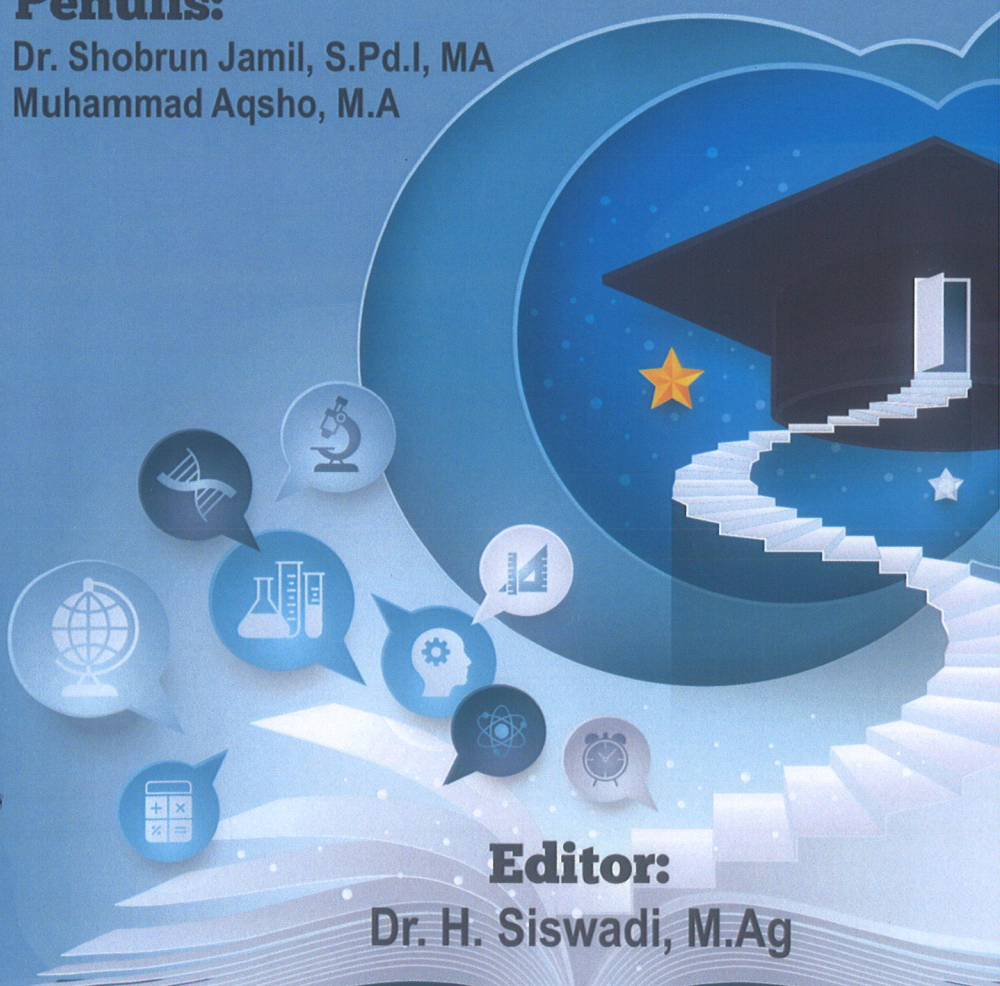
# Perencanaan Pendidikan Islam Dalam Teori

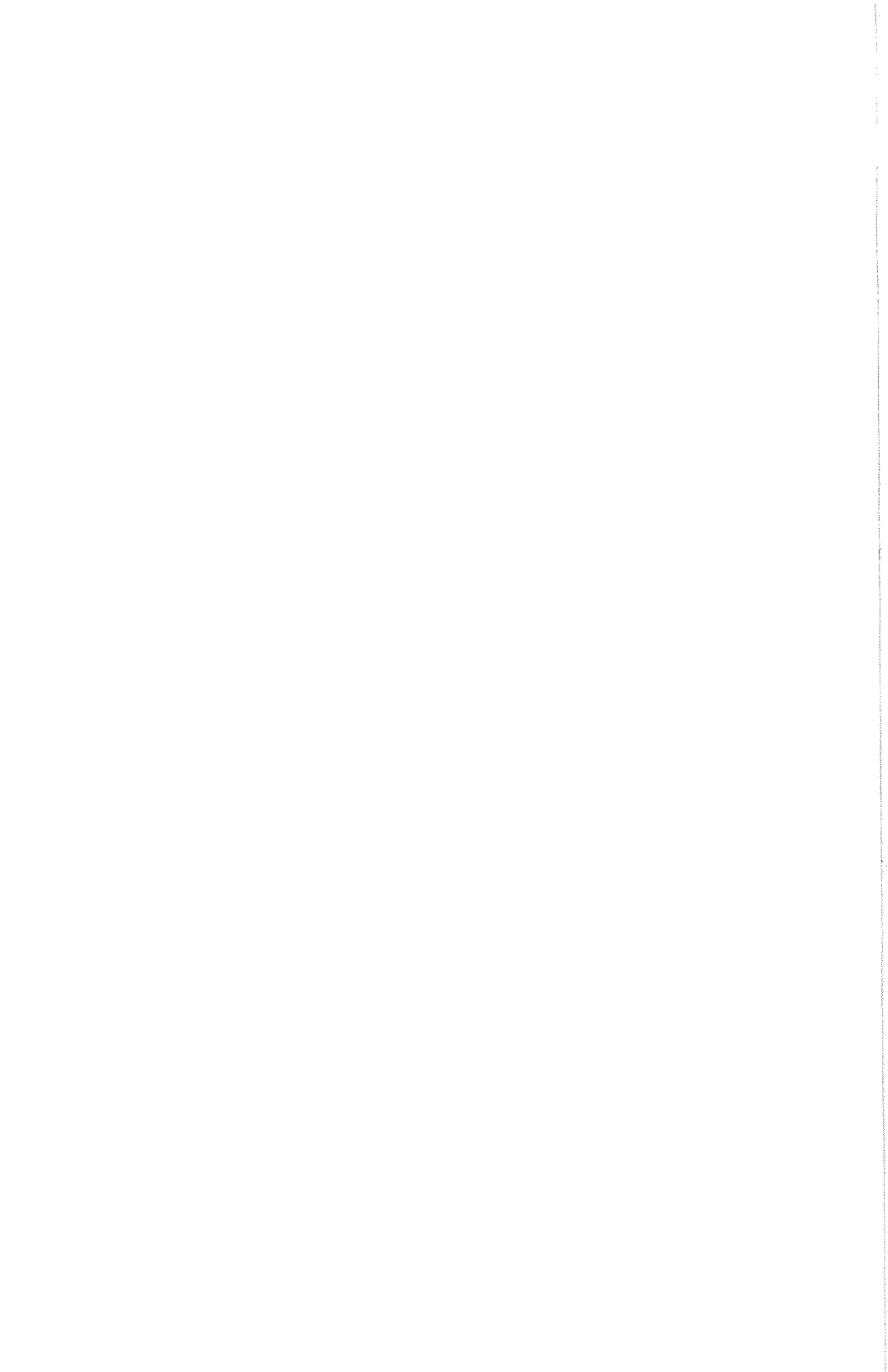
## Penulis:

Dr. Shobrun Jamil, S.Pd.I, MA  
Muhammad Aqsho, M.A

## Editor:

Dr. H. Siswadi, M.Ag





**PERENCANAAN  
PENDIDIKAN ISLAM  
DALAM TEORI**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM TEORI**

**Dr. Shobrun Jamil, S.Pd.I., M.A  
Muhammad Aqsho, M.A**



# PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM TEORI

© Dr. Shobrun Jamil, S.Pd.I., M.A dan Muhammad Aqsho, M.A

Diterbitkan Pertama kali  
oleh Penerbit Lutfi Gilang  
anggota IKAPI Jawa Tengah

Editor: Dr. H. Siswadi, M.Ag  
Desain sampul: Sekar Putri  
Desain isi: Nayasmita

Cetakan pertama: Juni 2022

[www.lutfigilang.carrd.co](http://www.lutfigilang.carrd.co)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN : 978-623-479-002-1

194 hlm; 15,5 x 23 cm

Dicetak dan didistribusikan oleh CV Lutfi Gilang  
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

# KATA PENGANTAR

***A**lhamdulillah wa asy-syukru lillah, puja dan puji syukur kepada Allah rabbul Izzati yang telah memberikan kemampuan dan ridha-Nya untuk menyelesaikan buku ini dengan segala kekurangan yang ada. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad saw. Sebagai tauladan dalam pendidikan Islam. Buku ini merupakan buka teori tentang perencanaan pendidikan dalam Islam.*

*Buku ini terdiri dari 12 bab yang di dalamnya membahas tentang teori perencanaan dalam pendidikan Islam berdasarkan teori-teori yang berkembang baik dalam kerangka filosofis, yuridis, dan teoretis.*

*Buku ini diharapkan menjadi khazanah terhadap buku tentang perencanaan pendidikan Islam yang disusun berdasarkan pendekatan sekarang terutama sesudah adanya Covid 19. sehingga pembahasan mengenai perencanaan pendidikan Islam memiliki rujukan yang meskipun sangat sederhana akan dapat berguna bagi berlangsungnya pendidikan Islam yang berkualitas sesuai dengan amanah undang-undang dasar dan tentunya tujuan dari pendidikan islam itu sendiri yaitu menjadi hamba Allah dan khalifah, sehingga lembaga pendidikan Islam benar-benar menjadi lembaga yang teroganisir sesuai dengan fungsinya mengembangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan sehingga mencapai karakteristik yang diharapkan.*

*Buku ini juga diharapkan menjadi buku rujukan yang akan ditulis dengan kerangka metodologis yang lebih tersistematis. Oleh sebab itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk penulisan revisi buku ini yang sangat banyak kekurangannya.*

*Demikian semoga berguna dan bermanfaat bagi diri penulis dan semuanya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan.*

*Medan, Maret 2022*

*Penulis*



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii

## BAB I

<b>PENGERTIAN, URGENSI, DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian, Urgensi dan Ruang Lingkup Perencanaan .....	2
B. Teori Dan Konsep Perencanaan .....	7
C. Strategi Perencanaan Pendidikan .....	11
D. Model Perencanaan Pendidikan .....	13
E. Misi dan Tujuan Program Perencanaan .....	15

## BAB 2

<b>LANDASAN DAN PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Perencanaan Pendidikan Islam .....	19
B. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam .....	28

## BAB 3

<b>PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM .....</b>	<b>38</b>
A. Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan Islam .....	39
B. Ruang Lingkup Permasalahan Pendidikan .....	43
C. Konseptualisasi dan Rancangan Rencana .....	46
D. Evaluasi Perencanaan Pendidikan Islam .....	49
E. Spesifikasi Perencanaan Pendidikan Islam .....	50

**BAB 4**

**MODEL DAN METODE PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM.....53**

- A. Model dan Metode Perencanaan Pendidikan Islam ..... 54
- B. Metode Perencanaan Pendidikan..... 57
- C. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat..... 60
- D. Model dan Metode Perencanaan Sekolah Berbasis Islam Kemasyarakatan ..... 63

**BAB 5**

**STAKEHOLDERS DALAM PENDIDIKAN ISLAM .....68**

- A. Pengertian Stakeholder Dalam Pendidikan Islam..... 69
- B. Peranan Stakeholder Pendidikan..... 73
- C. Fungsi Stake holder dalam Perencanaan Pendidikan ..... 77

**BAB 6**

**PERUMUSAN VISI, MISI DAN TUJUAN.....84**

- A. Perencanaan Visi dan Urgensinya..... 85
- B. Perumusan Misi Untuk Mencapai Visi..... 92
- C. Perumusan Tujuan Sebagai Implementasi Dari Misi ..... 95

**BAB 7**

**PERENCANAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ISLAM .....98**

- A. Sarana Dan Prasana Pendidikan Islam ..... 99
- B. Fungsi Jenis Dan Sifat Sarana Prasarana ..... 101
- C. Sarana Dan Prasarana Dalam Proses Belajar Mengajar ..... 102
- D. Sarana Dan Prasarana Dalam Konteks Pendidikan Islam ..... 105

## **BAB 8**

<b>PERENCANAAN TENAGA PENDIDIKAN.....</b>	<b>112</b>
A. Pengertian Tenaga Kependidikan.....	113
B. Perencanaan Tenaga Kependidikan .....	114
C. Hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan pegawai.....	117
D. Pengelolaan Tenaga Pendidik/Kependidikan .....	121
Kesimpulan.....	122

## **BAB 9**

<b>PERENCANAAN INTERAKSI DUKATIF.....</b>	<b>123</b>
A. Landasan dan prinsip Perencanaan Interaksi edukatif .....	124
B. Model interaksi edukatif.....	130
C. Rancangan Model Interaksi Edukatif .....	133
Kesimpulan.....	135

## **BAB 10**

<b>PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>136</b>
A. Konsep Sarana Prasarana .....	137
B. Perencanaan Sarana dan Prasarana .....	140
C. Proses Perencanaan dan Penghapusan Perencanaan .....	142
D. Penghapusan .....	146
E. Rancangan Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana ....	147

## **BAB 11**

<b>PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN.....</b>	<b>151</b>
A. Pengertian Perencanaan Biaya Pendidikan.....	152
B. Sumber Biaya Pendidikan .....	157
C. Manajemen Perencanaan Pembiayaan Pendidikan.....	160
D. Evaluasi Rancangan Pengelolaan Biaya Pendidikan .....	162

**BAB. 12**

**PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM.....164**

A. Pengertian Perencanaan Kurikulum ..... 164

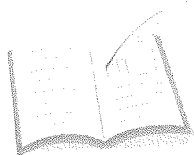
B. Model Perencanaan Kurikulum ..... 172

C. Langkah-Langkah Perencanaan Kurikulum ..... 174

**DAFTAR PUSTAKA .....177**

# BAB I

## PENGERTIAN, URGENSI, DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENDIDIKAN



**P**erencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah *planning* adalah satu dari fungsi management yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dengan melakukan yang demikian pekerjaan kita menjadi teratur, terkendali dan dapat dievaluasi. Suatu perencanaan dalam Hadits Nabi diistilahkan dengan menyiapkan bekal, sedangkan dalam firman Allah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebagaimana pesan Nabi kepada shahabat Abi Dzar ; “ *Perkokohlah bahtera karena lautan itu dalam, Perbanyaklah bekal karena perjalanan itu panjang...*”. Begitupun firman Allah dalam QS. al-Anfal : 60, “*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk*

*berperang kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya...".*

Sebagai sebuah hal yang penting perencanaan menjadi hal yang wajib untuk diketahui dalam sebuah organisasi yang membutuhkan aktivitas manajerial. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perencanaan itu? Lalu, apa saja jenis-jenis dari perencanaan? dan ruang lingkup serta urgensinya?

#### **A. Pengertian, Urgensi dan Ruang Lingkup Perencanaan**

Perencanaan didefinisikan sebagai *"The process of setting goals, developing strategies, and outlining tasks and schedules to accomplish the goals"*. Dalam keseharian, perencanaan dikenal dengan istilah *planning* yaitu proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa sebuah *planning* atau perencanaan adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Dalam istilah lain perencanaan merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien dalam sebuah organisasi.

Menurut Daft, perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan.<sup>2</sup> Perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.<sup>3</sup> Oleh sebab itu bagi Malayu Hasibuan, perencanaan merupakan proses untuk menentukan rencana yang bersifat dinamis dimana

1 Imam dan Djum Djum, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 320.

2 Richard L. Daft, *Era Baru Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Ed Ke-9, h. 212.

3 Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), Ed.2, h. 77.

perencanaan itu diproses sedemikian rupa oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana.<sup>4</sup> Perencanaan dalam hal ini sekaligus menyangkut tujuan (apa yang harus dikerjakan) dan sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan).<sup>5</sup>

Perencanaan diartikan sebagai suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Bintoro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana melakukannya.<sup>6</sup>

SP. Siagian mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Y. Dior berpendapat perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, dalam rangka mencapai sasaran tertentu.<sup>7</sup> Berbagai pendapat di atas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan dan sebagainya dimana semuanya itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu.

4 H. Malayu SP Hasibuan, *Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 91.

5 Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT Prenhalindo, 1999), Ed ke-6, h. 200.

6 Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Management*, (Yogyakarta: Bpfeyogyakarta, 1986), Ed-IV, h. 21

7 Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, (Jakarta, Univ. Prof. Dr. Moestopo Beragama Pers, 2008), h. 21.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan dan berkesinambungan yang sangat penting dan urgen.

Perencanaan memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam hal antara lain;

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan;
2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik;
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan;
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi;
5. Membantu manager menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;
6. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait;
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.<sup>8</sup>

Manfaat yang lain dari perencanaan adalah;

- a. Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai
- b. Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan.
- d. Menjadikan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan
- e. Memberikan batas wewenang dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana

---

<sup>8</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang, Erlangga, 2007), h. 170.



- f. Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini.
- g. Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal
- h. Menghindari pemborosan.<sup>9</sup>

Dengan adanya standar pelaksanaan (SOP) dan pengawasan, skala prioritas, tujuan, batasan wewenang, pedoman kerja dan sebagainya. Memungkinkan seluruh personil yang terlibat dalam organisasi atau tim akan dapat bekerja lebih transparan dan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dimensi waktu, spasial, dan tingkatan dan teknis perencanaannya. Namun demikian ketiga dimensi tersebut saling kait-terkait dan beriteraksi. Masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dari dimensi waktu

Sebagai sebuah bentuk perencanaan, maka dalam ranah waktu, dapat dibagi menjadi beberapa dimensi waktu, dimana perencanaan mencakup:

- a) Perencanaan jangka panjang (*long term planning*) berjangka 10 tahun keatas, bersifat prospektif, idealis dan belum ditampilkan sasaran-sarana yang bersifat kualitatif.
- b) Perencanaan jangka menengah (*medium term planning*) berjangka 3 sampai 8 tahun, merupakan penjabaran dan uraian rencana jangka panjang. Sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyksikan secara kuantitatif,

---

9 Richard L. Daft, *Era Baru*, h.214.

meski masih bersifat umum.

- c) Perencanaan jangka pendek (*short term planning*) berjangka 1 tahunan disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan (*annual plan*) atau perencanaan operasional tahunan (*annual opperasional planning*)

## 2. Perencanaan dari dimensi spasial

Perencanaan ini terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional (berskala nasional), regional (berskala daerah atau wilayah), perencanaan tata ruang dan tata tanah (pemanfaatan fungsi kawasan tertentu), bahkan perencanaan bersifat internasional atau global.

### 1) Perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan.

Dalam dimensi ini kita mengenal istilah:

- a) Perencanaan Makro, perencanaan makro meliputi peningkatan pendapatan nasional, tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan masyarakat, ekspor impor, pajak, perbankan dan sebagainya. Perencanaan mikro disusun dan disesuaikan dengan kondisi daerah.
- b) Perencanaan Kawasan, perencanaan kawasan memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- c) Perencanaan proyek, perencanaan proyek adalah perencanaan operasional kebijakan yang dapat menjawab siapa melakukan apa, dimana, bagaimana dan mengapa.

### 2) Perencanaan dimensi jenis. Menurut Anen (2000) sebagaimana dikutip Syaiful Sagala meliputi:

- a) Perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*)

- b) Perencanaan dari bawah ke atas (*botton up planning*)
- c) Perencanaan menyerong kesamping (*diagonal planning*) dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah di luar struktur
- d) Perencanaan mendatar (*horizontal planning*), yaitu perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel
- e) Perencanaan menggelinding (*rolling planning*) berkelanjutan mulai rencana jangka pendek, menengah dan panjang
- f) Perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas (*top down and botton up planning*), untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan wilayah/ daerah.<sup>10</sup>

## B. Teori Dan Konsep Perencanaan

Menurut Hudson dalam Tanner teori perencanaan meliputi, antara lain: sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial dan merupakan penggabungan dari taksonomi Hudson.<sup>11</sup>

### 1. Teori Sinoptik

Teori ini merupakan kepanjangan dari system planning, rational system approach, rasional comprehensive planning. Menggunakan model berfikir system dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi:

---

10 Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 257-259

11 *Ibid.*

- a. Pengenalan masalah
- b. Mengestimasi ruang lingkup problem
- c. Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian
- d. Menginvestigasi problem
- e. Memprediksi alternative
- f. Mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.

## 2. Teori *incremental*

Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan, selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.

## 3. Teori *transactive*

Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang *transactive* yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.

- a. Perencanaan mikro
- b. Perencanaan sektoral
- c. Perencanaan kawasan dan

## 4. Teori *advocacy*

Menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (*advocacy* = mempertahankan dengan argumentasi). Kebaikan teori ini

adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah atau badan pusat.

#### 5. Teori radikal

Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat atau manajer tertinggi yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi di sini juga mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia. Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri menangani lembaganya. Begitu pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.

#### 6. Teori Sitar

Merupakan gabungan kelima teori di atas sehingga disebut juga *complementary planning process*. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori di atas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari teori situational. Berarti teori baru ini di samping menggabungkan teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan

dan masyarakat.

Teori-teori tersebut di atas mempunyai persamaan dan perbedaan. Dari sisi persamaannya dapat dilihat pada hal-hal berikut: a) Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah; b) Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya. c) Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan, dan d) Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan. Sedangkan Perbedaannya adalah:

- 1) Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan yang lain.
- 2) Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner.
- 3) Perencanaan transactive mengedepankan faktor-faktor perseorangan atau individu melalui proses tatap muka dalam salah satu metode yang digunakan, perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih komprehensif.
- 4) Perencanaan advocacy cenderung menggunakan

pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan hal keadilan sosial

- 5) Perencanaan Radikal seakan-akan tanpa metode dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental dan sinoptik yang memepertimbangkan aturan-aturan yang ada baik akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang ada.

### C. Strategi Perencanaan Pendidikan

Strategi perencanaan pendidikan dapat diklasifikasi pada berikut:

1. Pendekatan (strategi) perencanaan pendidikan terkait erat dengan struktur penduduk. Ada lima pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu: a) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); b) pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*); c) pendekatan untung rugi (*cost and benefit*); d) pendekatan *cost eeffectiveness*, e) pendekatan terpadu. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pendekatan kebutuhan sosial (*sosial demand approach*). Pendekatan model ini didasarkan atas keperluan masyarakat saat ini dan menitik beratkan pada pemerataan pendidikan seperti wajib belajar (wajar 9 tahun). Kekurangannya pendekatan model ini adalah:

- 1) mengabaikan alokasi dalam skala nasional;
- 2) mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan;

3) cenderung hanya menjawab problem pemerataan dengan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas pendidikan<sup>12</sup>.

## 2. Pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*)

Pendekatan ini mengutamakan keterkaitan sistem pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Membengkaknya angka pengangguran misalnya menjadi pendorong untuk mempertemukan gape antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Upaya untuk hal ini misalnya diberlakukannya *system link and match*, magang, pendidikan profesi, pengembangan SMK dan sebagainya.

## 3. Pendekatan untung rugi (*cost and benefit*)

Dalam pendekatan ini dibuat perhitungan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan serta keuntungan yang akan diperoleh dari hasil pendidikan. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai upaya investasi yang harus memberikan keuntungan nyata pada saat nanti.

## 4. Pendekatan *cost effectiveness*

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mencapai hasil pendidikan seoptimal mungkin, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan ini diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relative pasti. Seperti dibukannya program magister management, magister bisnis administrasi, kursus-kursus dan sebagainya.

## 5. Pendekatan terpadu

Dalam Islam, pendekatan perencanaan tidak melulu pada faktor material saja atau duniawi tetapi lebih dari itu

---

12 *Ibid.*



mencakup tujuan ukhrawi atau keakhiratan. Pendekatan terpadu dapat digunakan untuk menjembatani berbagai kepentingan akan tujuan output pendidikan. Apalagi dalam Islam dikenal akan adanya dua kebutuhan duniawi dan ukhrowi sehingga pendekatan yang digunakan untuk pendidikan tentu semestinya mencakup kedua kebutuhan tersebut.

#### **D. Model Perencanaan Pendidikan**

Beberapa model perencanaan pendidikan yang patut diketahui, antara lain:

##### **1. Model Perencanaan Komprehensif**

Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam system pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik kearah tujuan-tujuan yang lebih luas.

##### **2. Model Target Setting**

Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal:

- a. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk
  - b. Model untuk memproyeksikan enrolmen (jumlah siswa terdaftar ) sekolah
  - c. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja
- ##### **3. Model Costing dan keefektifan biaya**

Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam criteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang

paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternative penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.

#### 4. Model PPBS

PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain: Kast Rosenzweig (1979) mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hartley (1968) mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. PPBS merupakan pendekatan yang sistematis. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman teori dan praktek.

- b. PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif.

Penerapannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif. Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari system ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut:

- 1) Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan.
- 3) Menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang.
- 4) Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan.
- 5) Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan ( Jujun S, 1980).

#### **E. Misi dan Tujuan Program Perencanaan**

Setiap perencanaan pada umumnya memiliki satu tujuan perencanaan yang mencakup langkah keseluruhan perencanaan, mulai perencanaan strategi sampai perencanaan operasional. Dengan demikian proses perencanaan melalui tahap-tahap

seperti:

1. Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap perubahan lingkungan atau masalah yang muncul.
2. Melakukan forecasting, menentukan program, tujuan, misi perencanaan.
3. Menspesifikasi tujuan.
4. Menentukan standar performan.
5. Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan.
6. Melakukan implementasi dan menilai.
7. Mengadakan reviu.

Karena itu perencanaan pendidikan memerlukan akuntabilitas dan kontrol agar sesuai dengan lapangan kerja dalam perencanaan pendidikan, sehubungan dengan usaha menciptakan iklim organisasi pendidikan yang hangat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Sebab kegiatan perencanaan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat, terutama pada masyarakat yang ada di sekitarnya.

Itu sebabnya mengapa perlu komunikasi dengan masyarakat, semua itu ada hubungannya di mana saling memberi, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Karena masyarakat turut bertanggungjawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan. Karena masyarakat sudah menjadi bagian kegiatan yang penting dalam mengendalikan roda perjalanan organisasi pendidikan. Sehingga masalah yang muncul baik dari lembaga sendiri maupun di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih tuntas.

Khusus para perencana pendidikan lebih-lebih perencanaan yang bersifat partisipatori yang perencanaan dilakukan

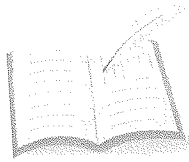
bersama di antara pecinta pendidikan yaitu lembaga pendidikan dan warga masyarakat. Mereka yang dapat mempengaruhi pendidikan dan dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang disebut stakeholder.

Jadi dari berbagai pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan dan poin penting antara lain:

- a. Perencanaan adalah sangat penting baik ditinjau dari sisi management maupun dari pandangan agama Islam, mengingat adanya pesan nabi Muhammad dan ayat Alquran yang menekankan hal tersebut.
- b. Diantara pengertian perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan.
- c. Di antara urgensi perencanaan adalah akan memberikan guideline (*framework*) untuk mencapai tujuan masa datang.
- d. Ruang lingkup perencanaan mencakup berbagai dimensi baik waktu, spasial, tingkatan dan teknis perencanaan.
- e. Teori perencanaan meliputi, antara lain; sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial
- f. Pendekatan (strategi) yang dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan Islam antara lain pendekatan kebutuhan social (*social demand approach*), pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), pendekatan untung rugi (*cost and benefit*), pendekatan cost effectiveness, dan pendekatan terpadu.
- g. Pendekatan terpadu lebih utama diterapkan dalam perencanaan pendidikan Islam mengingat adanya konsep Islam yang mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

# BAB 2

## LANDASAN DAN PRINSIP- PRINSIP PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM



Pendidikan dalam Islam sebagai sebuah proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba dihadapan Khaliq-nya dan juga sebagai *Khalifatu fil ardhi* (pemelihara) pada alam semesta ini memerlukan sebuah perencanaan sehingga tujuan yang diharapkan menjadi nyata dan terimplementasi dalam bentuk perubahan sikap dan sifat peserta didik.<sup>13</sup>

Belum lagi secara sistematis, pendidikan adalah sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, proses belajar mengajar, guru, murid, manajemen, saran prasarana, biaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Soerjono Soekamto dalam bukunya sosiologi sebagai pengantar, mengutip pendapat Gillin tentang perubahan sosial sebagai suatu variasi dari sebuah cara hidup yang telah ada dan diterima dalam masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi (susunan)

<sup>13</sup> Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 17.

penduduk, ideology maupun juga karena adanya difusi maupun penemuanpenemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat.<sup>14</sup>

## A. Landasan Perencanaan Pendidikan Islam

### 1. Pengertian Landasan Perencanaan Pendidikan Islam

Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan atau tempat. Landasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:260) istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal.

Yatimah mengartikan secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan (pendidikan) merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan.<sup>15</sup> Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar,

---

14 Soerjono Soekamto, *Sosiologi Sebagai Sebuah Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 71

15 Yatimah, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: Alungadan Mandir 2017), h. 354.

situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan.<sup>16</sup> Tanpa landasan yang jelas secara alami pendidikan menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan, sebuah ironi yang tidak sesuai dengan proses dan tujuan pendidikan itu sendiri.<sup>17</sup>

Terlebih adalah pendidikan Islam yang merupakan proses *rabbani* dalam usaha untuk menumbuhkembangkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan akal untuk mengetahui penciptaannya sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah, atau dalam bahasa Islam disebut dengan insan kamil, *ulul albab*, *ulul ilmi* dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Jadi Landasan Pendidikan Islam ialah dasar untuk membentuk pribadi seseorang agar bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, menghormati dan menyayangi orang tua dan sesamanya serta mencintai tanah air sebagai karunia yang telah diberikan oleh Allah menurut Sayyid Qutb adalah Alquran, karena pendidikan berdimensi pada *at-tarbiyyah* Alquran *iyah*.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 20032 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

---

16 *Ibid.*

17 Elfachmi, A. K. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Erlangga, 2016), h. 43.

18 Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 74-75.

19 Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Alquran* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats, tth), h. 230.



belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>20</sup>

Dengan demikian, *at-tarbiyyah Alquran iyyah* mengarahkan pada perencanaan pendidikan islam harus mempunyai landasan yang profan dimana semua kegiatan dan perumusan tujuan pendidikan islam itu dihubungkan dengan ALquran dan tujuan suci manusia sebagai hamba Allah. Singkatnya, landasan perencanaan pendidikan islam yang baik dan benar terdiri dari Alquran dan sunah Nabi Muhammad yang dikembangkan dengan Ijtihad.

### 1. Alquran

Sebagai diktum rabbani, pendidikan tentunya memiliki kaitan yang erat dengan Alquran sebagai landasan etis dan prophetis dimana ayat-ayat di dalam Alquran memiliki siprit yang responsip terhadap pendidikan Islam. Alquran merupakan firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Di dalamnya terkandung pokok-pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Alquran itu terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah. Masalah aqidah tidak banyak dibicarakan dalam

---

20 Alquran, tidak sebanyak ajaran yang berkenaan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

amal perbuatan (syari'ah). Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam membicarakan ilmu tentang syari'ah adalah: a) ibadah untuk perbuatan yang berhubungan dengan Allah, b). mu'amalah untuk perbuatan yang berhubungan dengan selain Allah dan c). akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan.

Pendidikan yang termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah sangat penting karena menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik yang pribadi maupun masyarakat. Sehingga sangat perlu untuk direncanakan guna mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan. Untuk mendapat suatu perencanaan yang baik dan benar perlu landasan yang baik dan benar pula. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Al Isra : 18-19.

Artinya: "Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka Jahanam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik". (Q.S Al-Israa:18-19)

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah yang dijadikan sebagai sumber ajaran kedua sesudah Alquran, yang mengandung tentang aqidah dan syariah. As-Sunnah dijadikan petunjuk (pedoman) untuk

kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa. Tentang kewajiban kita mentaati sunnah Rasul, Allah menegaskan dalam Alquran surah An-Nisa : 59.

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

### 3. Ijtihad

Ijtihad dalam perencanaan pendidikan harus tetap bersumber dari Alquran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli Pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup disuatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. Selanjutnya, dalam memahami Perencanaan Pendidikan Islam harus memperhatikan dua landasan yaitu landasan filosofis dan landasan teoritis.

#### b. Macam-Macam Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yang dikembangkan di Indonesia sendiri berpatok pada beberapa landasan, yaitu:

##### 1. Landasan Filosofis

Dalam setiap pemikiran konseptual, landasan filosofis mutlak diperlukan sebagai sebuah proses ijtihadi yang didasarkan pada kaidah ilmiah sebuah ilmu pengetahuan.

Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Kata filsafat (philosophy) bersumber dari bahasa Yunani, philien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relative. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja.<sup>21</sup>

Landasan filosofis pendidikan Islam adalah asumsi filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan Islam.<sup>22</sup> Landasan filosofis berkenaan dengan tujuan filosofis praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga bidang kajian yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan filosofis pendidikan Islam memberikan rambu-rambu yang seharusnya dilaksanakan dalam pendidikan Islam. Landasan filosofis pendidikan mencakup nilai-nilai dimensi filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi merupakan kajian filsafat atas pengetahuan, ontologi merupakan kajian filsafat atas yang ada, dan aksiologi merupakan kajian filsafat atas nilai.<sup>24</sup>

Ketiganya menjadi landasan dari pendidikan dan titik acuan praktik pendidikannya. Terdapat beberapa paham

---

21 Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 3.

22 Suyitno, Y. *Landasan Filosofi Pendidikan* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), h. 20.

23 Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2013), h. 45.

24 *Ibid.*

atau aliran filsafat yang menjadi landasan kerangka berpikir manusia dalam pendidikan. Empirisme, merupakan aliran filsafat yang bertitik-tolak pada pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Perennialisme, merupakan aliran filsafat yang bertitik-tolak pada spiritualisme yang memahami bahwa suatu nilai telah ada. Positivisme, merupakan suatu aliran filsafat yang memahami bahwa suatu hal adalah benar jika berasal dari ilmu pengetahuan. Eksistensialisme, merupakan aliran filsafat yang memahami kebebasan manusia adalah dari keberadaan manusia itu sendiri. Terdapat banyak aliran atau paham filsafat lainnya yang bisa menjadi landasan dari arah pendidikan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa filosofis pendidikan Islam merupakan kerangka landasan yang sangat fundamental bagi sistem pendidikan dan para pendidik yang bersifat idealis berdasarkan pemikiran yang tersistematis dan ilmiah. Ilmu pendidikan Islam hakikatnya bersumber dari filosofi tentang Tuhan dan hal tersebut dapat melatih perasaan para siswa dengan berbagai cara sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan terhadap segala jenis pendidikan, mereka dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sadar akan nilai etis religiusitasnya. Abdurrahman an-Nahlawi menyebutkan bahwa pendidikan mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada tuntunan Allah".<sup>25</sup>

Hubungan filsafat dengan pendidikan adalah membangun filsafat hidup agar dapat dijadikan pedoman

dalam memperbaiki pengajaran, termasuk mengembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan dan metode mengajar serta penilaian pengajaran.

#### 7. Landasan Strategi Pembelajaran

Strategi adalah susunan, pendekatan atau kaidah-kaidah untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu dan kemudahan secara optimal. Strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Strategi pembelajaran terdiri atas metode atau teknik pengajaran.

### B. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dalam prosesnya juga memiliki sebuah perencanaan yang harus sesuai dengan Alquran yaitu penggunaan akal. Dalam Alquran Allah sebagai al-khaliq (Pencipta) dan rabb al-'alamin (pemelihara semesta alam) juga mempunyai rencana untuk diturunkannya manusia yaitu Adam. Bahkan dalam penciptaan alam semesta Tuhan juga yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Hal demikian kemudian dikenal sebagai aturan-aturan yang diterapkan Allah sendiri, atau disebut (*sunnatullah*).<sup>26</sup>

Perencanaan menurut Bintoto Tjokroaminoto adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar

---

26 Mujamil Qomar, *Manajemen*, h. 65.

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut para pakar antara lain:

1. Menurut Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal.
2. Menurut Guruge, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.<sup>28</sup>

Peranan manusia dalam pendidikan secara teologis dimungkinkan karena posisinya sebagai makhluk, ciptaan Allah, yang paling sempurna dan dijadikan sebagai *kholifatullah fi al-ard* (pengganti atau wakil Tuhan di muka bumi). Manusia dan masyarakat selalu berubah, mengalami perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, baik yang dapat diterima maupun yang harus ditolak, maka pendidikan Islam juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat dan secara normative sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. Pendidikan Islam bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan, akan tetapi mampu mengendalikan perubahan itu.

Oleh sebab itulah, pendidikan Islam harus mengantisipasi perubahan itu dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi pendidikan, perhitungan-perhitungan secara teliti sudah harus dilakukan pada fase perencanaan pendidikan. Untuk

---

27 Kasmawati, "Implementasi Perencanaan Pendidikan dalam Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Idaarah*, Vol. III, No. 1 (Juni 2019), 140.

28 Aep Kusnawan, "Perencanaan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15 (Januari-Juni 2010), 902

memenuhi tuntutan tersebut, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif
- b. Perencanaan pendidikan harus bersifat integral
- c. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif
- d. Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan kontinyu
- e. Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi
- f. Perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada
- g. Perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi administrasi yang efisien dan data yang dapat diandalkan.<sup>29</sup>

Mengacu kepada sumber ajaran Islam, baik Alquran, al-Hadis, sejarah, pendapat para sahabat, masalahat murshalah dan uruf, dapat dijumpai beberapa prinsip pendidikan sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### 1) Prinsip Wajib Belajar dan Mengajar

Prinsip wajib belajar adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dalam Islam merasa bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intelektual, spiritual, dan sosial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan prinsip ini, pendidikan Islam tidak menghendaki adanya orang yang bodoh, karena orang yang bodoh bukan saja menyusahkan dirinya, melainkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 15.



menyusahkan orang lain.

## 2) Prinsip Pendidikan Untuk Semua (Education For All)

Prinsip pendidikan untuk semua adalah prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan, atau diskriminasi. Pendidikan harus diberikan kepada semua orang dengan tidak membedakan karena latar belakang suku, agama, kebangsaan, status sosial, jenis kelamin, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dengan alasan, jika ada orang yang tidak mengenyam pendidikan (bodoh), maka kebodohan itu tidak hanya merugikan dirinya, melainkan juga merugikan atau akan menjadi beban orang lain. Itulah sebabnya, semua orang harus dididik, sehingga masing-masing dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya, dapat mengatasi masalah sendiri dan tidak jadi beban bagi orang lain. Prinsip ini harus diterapkan dalam merumuskan kebijakan dan mempraktikkan pendidikan Islam.

## 3) Prinsip Pendidikan Sepanjang Hayat (Long Life Education)

Prinsip pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip yang menekankan, agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Mereka harus belajar walaupun sudah menyandang gelar keserjanaan. Hal tersebut dilakukan, karena beberapa alasan. Pertama, setiap ilmu yang dipelajari suatu saat akan hilang atau lupa dari ingatan, karena disebabkan tidak pernah di pelajari lagi. Kedua, bahwa ilmu pengetahuan setiap saat mengalami perkembangan, pembaruan, bahkan pergantian, mengingat data yang digunakan ilmu pengetahuan tersebut sudah berubah. Oleh sebab itu, jika ia tidak terus menerus belajar, maka akan tertinggal dari perkembangan, dan ilmu

pengetahuan yang dimilikinya tidak dapat digunakan lagi, karena sudah tidak relevan.

#### 4) Prinsip Pendidikan Berwawasan Global dan Terbuka

Prinsip pendidikan berwawasan global, maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya yang terdapat di dalam negeri sendiri, melainkan juga ilmu yang ada di negeri orang lain, namun sangat diperlukan untuk negeri sendiri. Selain itu, pendidikan berwawasan global, menekankan bahwa pendidikan yang dilakukan di tujuan untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia, dan di juga menggunakan standar yang berlaku di seluruh dunia.

#### 5) Prinsip Pendidikan Integralistik dan Seimbang

Prinsip pendidikan integralistik adalah prinsip yang memadukan antara pendidikan ilmu agama dan pendidikan umum, karena sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa ilmu agama dan umum baik secara ontologis (sumbernya), epistemologi (metodenya), maupun aksiologis (manfaatnya) sama-sama berasal dari Allah.

#### 6) Prinsip Pendidikan Yang Sesuai Dengan Bakat Manusia

Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia adalah prinsip yang berkaitan dengan merencanakan program atau memberikan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat, hobi dan kecenderungan manusia sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.

#### 7) Prinsip Pendidikan Yang Menyenangkan Dan Menggembirakan

Prinsip pendidikan yang menyenangkan ialah prinsip pendidikan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang manusiawi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, selalu memberikan jalan keluar dan pemecahan

masalah, memuaskan mencerahkan, menggembirakan, dan menggairahkan. Dengan prinsip ini, setiap anak akan merasa senang untuk belajar, timbul gairah dan minat yang tinggi, mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan rasa senang, betah tinggal di dalam kelas selama berjam-jam, serta mencintai dan menyayangi gurunya.

#### 8) Prinsip Pendidikan Yang Berbasis Pada Riset Dan Rencana

Prinsip pendidikan yang berbasis pada riset maksudnya adalah pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam, dan bukan berdasarkan dugaan atau asal-asalan. Adapun prinsip pendidikan yang direncanakan adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang yang ditopang oleh hasil kajian dan penelitian yang mendalam.

#### 9) Prinsip Pendidikan Yang Unggul Dan Profesional

Prinsip pendidikan yang unggul adalah prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi dan mengutamakan mutu lulusan yang unggul dan ditopang oleh berbagai komponen pendidikan lainnya yang unggul pula. Adapun prinsip pendidikan yang profesional adalah prinsip yang memberikan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola pendidikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Prinsip pendidikan yang unggul dan profesional adalah prinsip yang melihat bahwa tugas mendidik adalah amanah yang tidak bisa di serahkan pada sembarang orang.

#### 10) Prinsip Pendidikan yang Rasional dan Objektif

Prinsip pendidikan yang rasional adalah prinsip yang menekankan, agar segala kebijakan yang ditempuh dalam bidang pendidikan dapat dijelaskan alasan dan argumentasinya, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima

dengan penuh kesadaran dan pengertian, dan bukan karena paksaan. Adapun prinsip pendidikan yang objektif adalah prinsip yang menekankan, bahwa segala kebijakan atau praktik yang dilakukan dalam bidang pendidikan didasarkan pada fakta dan alasan yang sesungguhnya, bukan karena kepentingan dan maksud-maksud seseorang atau kelompok tertentu dengan prinsip ini, maka pendidikan akan terhindar dari pemaksaan dan penyalahgunaan oleh berbagai internal dan eksternal yang tidak di harapkan.

#### 11) Prinsip Pendidikan Yang Berbasis Masyarakat

Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat adalah prinsip yang menekan atau mengidealkan adanya partisipasi dan inisiatif yang penuh dan kuat dari masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah sistem maupun proses yaitu kegiatan yang membutuhkan bantuan semua disiplin ilmu, keahlian, dan berbagai hal lainnya: sarana prasarana, infrastruktur, peralatan dan media pengajaran, sumber daya manusia, keamanan dan kenyamanan lingkungan, pembiayaan, pengguna lulusan, dan sebagainya. Semua kebutuhan pendidikan tersebut baru terwujud apabila mendapatkandungannya dari semua pihak.

#### 12) Prinsip Pendidikan Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman

Prinsip pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah prinsip yang menekankan danya penyesuaian berbagai kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengorbankan hal-hal yang bersifat ajaran dan prinsip. Prinsip ini ditekankan, karena tugas utama pendidikan adalah mengantarkan atau menyiapkan manusia agar dapat hidup dan eksis sesuai dengan zamannya.

Pendidikan harus melahirkan lulusan yang dibutuhkan oleh zaman dalam arti yang positif.

### 13) Prinsip Pendidikan Sejak Usia Dini

Prinsip pendidikan sejak usia dini adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang tidak terlambat memberikan pendidikan pada anaknya, dan juga berarti prinsip yang menekankan, bahwa usia dini merupakan usia yang paling baik untuk dimulainya pendidikan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan sejak usia dini ini mulai disadari, setelah terdapat sejumlah fakta yang menunjukkan, bahwa perilaku seseorang di masa dewasa sangat ditentukan oleh pendidikan yang mereka terima di masa kanak-kanak.

### 14) Prinsip Pendidikan Yang Terbuka

Prinsip pendidikan yang terbuka adalah prinsip yang menekankan, agar dalam mengelola pendidikan senantiasa terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan bagi kemajuan pendidikan. Prinsip pendidikan yang terbuka juga ditekankan, agar sekolah dan masyarakat saling mengisi dan melengkapi serta saling meng akses, mengingat antara satu yang lainnya saling membutuhkan. Di satu sisi keberadaan pendidikan karena memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan di sisi lain, keberadaan masyarakat juga di tentukan oleh corak pendidikan yang diterimanya.

Jadi kesimpulannya adalah, bahwa landasan Pendidikan Islam ialah dasar untuk membentuk pribadi seseorang agar bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, menghormati dan menyayangi orang tua dan sesamanya serta mencintai tanah air sebagai karunia yang telah diberikan oleh Allah.

Landasan perencanaan pendidikan Islam yang baik dan benar terdiri dari Alquran dan sunah Nabi Muhammad yang dikembangkan dengan Ijtihad. Landasan pendidikan islam sendiri meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis-budaya, landasan psikologis, landasan ilmiah, landasan supervise pendidikan, dan landasan strategi pembelajaran.

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang harus dilakukan atau diper-timbangkan oleh para perencanaan ketika akan menyusun rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan itu harus memperhitungkan prinsip-prinsip:

- a) Komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan, setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya baik formal maupun non formal pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya.
- b) Integral, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus yang sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan.
- c) Efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus dalam pengelolaannya.
- d) Fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.
- e) Objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja.
- f) Kelengkapan dan keakuratan data, yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang

lengkap dan akurat, karena jika tidak akan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.

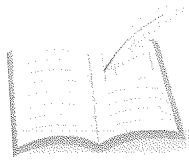
g) Kontinyu yaitu perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.<sup>31</sup>

---

31 Martin, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Cet, I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013),h. 32.

# BAB 3

## PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM



**S**ecara filosofis, dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita selalu penuh dengan perencanaan. Akan tetapi, sering tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan menentukan berhasil tidaknya suatu program, program yang tidak melalui perencanaan yang baik cenderung gagal. Dalam arti kegiatan sekecil dan sebesar apapun jika tanpa ada perencanaan kemungkinan besar berpeluang untuk gagal.

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.



## A. Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan Islam

### 1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu perencanaan juga berarti, suatu proses yang sistematis dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik haruslah memenuhi berbagai syarat, di antaranya adalah: terangnya tujuan, realisme dalam rangka potensi yang ada dan yang diharapkan, kesinambungan, ketuhanan, wujudnya data-data dan statistik yang tepat dan menyeluruh, fleksibilitas dan kesediaan berubah bila perlu dan kepatuhan yang menghendaki bahwa apabila rencana sudah dipersetujui maka ia sudah menjadi beban dan ikatan.

Pokok-pokok pikiran dalam perencanaan ialah sebagai berikut, 1) Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh baik buruknya perencanaan; 2) perencanaan harus dapat memandang atau meramalkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang, berdasarkan kenyataan objektif yang ada pada masa sekarang dan masa lalu; 3) perencanaan harus diarahkan pada tercapainya pada suatu tujuan sehingga bila terjadi suatu kegagalan dalam pelaksanaan, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah kurang sempurnanya

perencanaan; 4) perencanaan harus memikirkan anggaran, kebijakan, prosedur, metode, dan kriteria- kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Kategori Perencanaan

Terdapat sejumlah kategori perencanaan(*planning*) yang perlu diketahui, di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan fisik (*physical planning*), adalah perencanaan yang berhubungan dengan sifat-sifat serta peraturan material gedung dan alat- alat. Misalnya perencanaan gedung, laboratorium agama, alat peraga pembelajaran, dan sebagainya.
- b. Perencanaan fungsional(*functional planning*), adalah sebuah perencanaan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi atau tugas- tugas tertentu, misalnya planning pesantren Ramadhan, planning Hari Besar Islam.
- c. Perencanaan secara luas(*comprehensive planning*), adalah perencanaan semesta yaitu, suatu perencanaan yang mencakup kegiatan- kegiatan secara keseluruhan dari pada suatu usaha yang mencakup faktor- faktor intern dan ekstern.
- d. Perencanaan yang dikombinasikan(*general combination planning*), adalah perencanaan yang meliputi berbagai unsur- unsur dari perencanaan tersebut di atas yang digabungkan dan dikembangkan sedemikian rupa menjadi rupa menjadi satu pola yang lengkap dan sempurna.

Berdasarkan lingkupnya, perencanaan mencakup di dalamnya adalah perencanaan mikro dan dan makro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

### **3. Langkah-langkah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam**

#### **a. Menetapkan Misi dan Tujuan**

Dalam pendidikan misi dan tujuan pengajaran mengacu kepada misi dan tujuan pendidikan mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pengajaran, atau tujuan instruksional yang terdiri dari tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus (standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar).

#### **b. Diagnosis Hambatan dan Peluang**

Diagnosis terhadap hambatan dan peluang merupakan bagian dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari "*Strenghts*" (kekuatan), "*Weakness*" (kelemahan), "*Opportunities*" (peluang) "*Threats*" (ancaman) terhadap lingkungan situasi dan kondisi yang dihadapi suatu lembaga atau organisasi. Analisis SWOT didasarkan pada suatu asumsi bahwa suatu program kegiatan yang efektif akan memberikan kemampuan untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki lembaga serta men-imumkan kelemahan dan ancaman terhadap lembaga.

#### c. Menilai kekuatan dan kelemahan

Kekuatan bertumpu pada sumber daya yang dimiliki baik sumber daya personal maupun daya material, maupun sumber daya keuangan. Sedangkan kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki lembaga yang berkaitan dengan dengan sumber daya manusia dengan kualitas dan kapabilitasnya, sumber daya material yang terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, dan sumber daya keuangan yang terbatas, serta loyalitas pegawai yang masih minim.

#### d. Mengembangkan Tindakan Alternatif

Setelah SWOT maka, kepala sekolah dan guru dalam membuat perencanaan pengajaran harus dapat memilih alternatif tindakan dan langkah-langkah yang terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.

#### e. Mengembangkan rencana strategi

Dalam perencanaan pengajaran strategi yang dikembangkan adalah strategi pengajaran. Strategi pengajaran merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana pengajaran dengan menggunakan berbagai komponen dalam rangka mencapai tujuan belajar dan pengajaran yang telah ditetapkan.

#### f. Membuat Model Pengembangan

Pengembangan rencana strategi pengajaran dilakukan dengan membuat model pengembangan sistem pengajaran yang meliputi perencanaan dan proses dalam pengajaran.

g. Mengembangkan rencana operasional

Pengembangan rencana operasional dalam perencanaan pengajaran diawali dengan melakukan analisis materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, analisis terhadap kalender pendidikan, pembuatan program tahunan, program semester, serta pembuatan silabus, dan sistem penilaian.

## **B. Ruang Lingkup Permasalahan Pendidikan**

Kebutuhan akan perencanaan timbul karena semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Permasalahan muncul karena adanya suatu aktifitas atau kejadian yang menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, ekologi, penurunan sumber daya, serta penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan yang sembarangan, menempatkan institusi pendidikan untuk dapat menemukan solusinya. Jika institusi pendidikan diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka kemampuan merencanakan menjadi suatu keharusan.

Untuk menanggulangi masalah, terlebih dahulu aktifitas perencanaan pendidikan harus difahami dari berbagai segi. *Dari segi umum* perencanaan pendidikan merupakan suatu penelitian, pengembangan teori dan teknik, penggambaran rencana pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global. *Dari segi fisik*, perencanaan pendidikan merupakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek gedung sekolah, tata ruang gedung sekolah dan peralatannya, kriteria lingkungan kegiatan pembelajaran, dan lainnya.

*Dari segi sosial* merupakan tinjauan yang merefleksikan orang, perencanaan kurikulum, strategi instruksional, tinjauan kebutuhan tenaga kerja dan sosial. *Dan dari segi administrasi*, perencanaan pendidikan merupakan kontrol pengembangan, pembuatan keputusan, manajemen operasi, dan kontrol inventaris.

Pada umumnya kendala yang muncul pada proses perencanaan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi akan berdampak lebih besar pada tingkat dibawahnya. Lingkungan, ketersediaan SDM, sosial budaya, ekonomi dan politik, menjadi hal yang penting diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, posisi, letak dan ukuran pendirian suatu sekolah karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan proses perencanaan pendidikan tidak terlepas dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu sebuah proses membentuk kepribadian manusia melalui kegiatan pendidikan yang dirancang dan direncanakan secara sistematis dalam suatu sistem pendidikan. Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan mengacu pada tujuan sosial dan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan Islam yang memandang pendidikan secara universal sebagai keseluruhan aspek manusia meliputi; agama, masyarakat dan kehidupannya, alam semesta, ibadah, akhlak dan muamalah, sebagaimana Firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata*

*bagimu.” (Q.S.Al-Baqarah /2 : 208)*

Secara umum perencanaan meliputi:

1. Lingkup dan cakupan bidang permasalahan.
2. Rentang permasalahan termasuk di dalamnya perencanaan penyelesaian.
3. Akibat yang ditimbulkan, analisis permasalahan serta upaya penyelesaiannya.
4. Perhatian secara umum atas keberadaan masalah dan penyelesaiannya.

Mengingat beragamnya peran perencanaan pendidikan tersebut, maka keterlibatan berbagai tingkatan (*stake holders*) yang ada di masyarakat dipandang perlu. Bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah atau pemerintah. Untuk menghasilkan atau mencapai solusi optimal suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada, baik secara individu maupun keinstitusian. Secara individu, seseorang mengalami hambatan terhadap kebutuhan dasar yang terklasifikasi kedalam tiga prinsip pokok. Yaitu, memelihara atau mempertahankan kehidupan, meningkatkan atau memperbaiki kehidupan, dan menyempurnakan keinginan-keinginan bagi kepuasan. Adapun dari segi keinstitusian, perencana pendidikan dituntut untuk mengenal karakteristik dari suatu institusi. Di antaranya, orientasi terhadap tempat, bekerja pada suatu periode tertentu, dan ketergantungan pada keterlibatan kerja individu yang ada di dalamnya.

Dalam pendidikan Islam, implikasi dari proses perencanaan pendidikan adalah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan bertujuan

membentuk pribadi manusia melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui segera. Sebuah proses yang memerlukan perencanaan dan perhitungan yang matang, sehingga kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan dapat dihindarkan.

### C. **Konseptualisasi dan Rancangan Rencanaan**

Dalam pembahasan perencanaan pendidikan, perencana pendidikan harus mengkaji pola-pola dan kecendrungan yang umum dan menonjol dari manusia, tempat, pergerakan, akonomi, dan aktivitas. Prinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan lingkungan pendidikan. Perencana pendidikan hendaknya memperhatikan empat hal berikut:

1. Aktivitas yang tercakup dalam berbagai institusi pendidikan.
2. Kebutuhan manusia akan institusi pendidikan.
3. Perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik.
4. Administrasi gedung dan peralatan sekolah.

Perencana pendidikan hendaknya seorang analis yang terampil, evaluator yang efektif, dan desainer yang cakap. Perencana merupakan seorang professional yang dengan pengalaman dan pendidikannya mampu membuat konsep mengenai pedoman pelaksanaan satu tugas sampai selesai.

Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyusun strategi dan rencana dalam segenap urusannya, dan hendaknya kita konsisten dengan apa-apa yang telah kita rencanakan dalam urusan kemaslahatan. Firman Allah: *"Dan Aku memberi tanggung kepada mereka. Sesungguhnya*



*rencana-Ku amat tangguh”(Q.S. Al-Qalam/68 : 45).*

Fungsi perencana pendidikan sangat banyak dan beragam. Karena seorang perencana dapat berfungsi sebagai perumus dan pelaksana pencapaian tujuan. Perencana harus terus menerus memonitor dan mengevaluasi perencanaan, juga bertindak sebagai penyangga politik untuk memastikan penyelesaian dari perencanaan tersebut. Peran utama perencana meliputi: a) pemimpin institusi, b) perencana professional, c) komunikator, d) promotor.

Pekerjaan perencana pendidikan memerlukan interpretasi ringkas mengenai kabutuhan masyarakat dan bagaimana cara perencanaan tersebut memenuhinya. Dengan demikian perencanaan tersebut harus bersifat komprehensif. Perencana harus menyeimbangkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang memungkinkan terjadi.<sup>32</sup>

Dalam mengkonsep rencana, hendaknya perencana juga memperhatikan berbagai pola dan kecendrungan yang menonjol pada beberapa hal berikut.

a) Pada manusia; Hubungan antara manusia dengan lingkungan bukanlah hal yang baru. Konsepnya sederhana, yaitu bahwa seseorang dilahirkan dengan berbagai potensi untuk dapat mengembangkan pola prilaku dan lingkungannya. Mekanisme keturunan, karekteristik genetika, dan mekanisme naluriah merupakan faktor penting dalam efektifitas adaptasi manusia dengan lingkungannya.

b) Pada tempat; Lingkungan yang sesuai dapat secara efektif mempengaruhi prilaku individu dan membantu menggali

32 H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 102.

potensi dasarnya. Setting yang sesuai menekankan siswa sebagai individu dan menghasilkan konsep diri yang lebih positif.

- c) Pada pergerakan. Setiap hari siswa memulai aktivitas belajar dengan pergerakan. Namun pengalaman ini tidak dijadikan bagian dari program pendidikan, baik formal ataupun informal. Akibatnya, individu tidak peduli terhadap kekacauan, kemacetan dan bahaya. Banyak program sekolah yang belum memecahkan masalah pergerakan ini.
- d) Pada ekonomi; Salah satu kebijakan ekonomi yang berkelanjutan adalah pembaharuan kota. Didalamnya tercakup perluasan kota, administrasi proyek, pengembangan dan perbaikan fasilitas baru, dan lain sebagainya. Disini diperlukan adanya pendekatan sistem yang lebih komprehensif dengan masalah pembaharuan perkotaan. Dan kebijakan yang timbul hendaknya benar-benar memperhatikan orang-orang yang tinggal di area tersebut.
- e) Pada aktivitas; Kajian sistem aktivitas pendidikan hendaknya mengikuti kajian aktivitas siswa, distribusi ruang dalam lingkungan perkotaan, dan hubungannya dengan sistem perkotaan lainnya. Sistem aktivitas pendidikan dapat dianggap sebagai perilaku yang melibatkan sejumlah orang yang ada dalam satu tujuan. Pandangan ini menekankan alasan seseorang untuk bertindak.

Apapun tujuan yang diharapkan dalam proses penentuan tujuan perencanaan hendaknya selalu mengantungkan kesadaran diri dan fikiran hanya kepada Allah. Dengan cara berfikir dan

berzikir kepadaNya, dan mampu mentrans-internalisasikan (mengamalkan) ke dalam tingkah laku nyata. *“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”*<sup>33</sup>

#### **D. Evaluasi Perencanaan Pendidikan Islam**

Dalam perencanaan, evaluasi juga mesti dilakukan dalam rangka mencari kelebihan dan kekurangan dari perencanaan yang akan dan telah dilakukan. Evaluasi terhadap perencanaan menegaskan begitu pentingnya perencanan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya. Sesuai kebutuhannya, lebih jauh evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Sebuah rencana bukanlah hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan, dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Evaluasi rencana adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi rencana itu sangat bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi rencana itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari perencanaan yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi rencana adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (*decision maker*).

Seorang evaluator hendaknya bertindak bijaksana dalam

---

33 *Q.S. Ali Imran/3 : 19).*

melakukan evaluasi dan senantiasa dapat bermusyawarah untuk mengambil keputusan, sebagaimana difirmankan Allah: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah..Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."*(Q.S.Ali Imran/3 : 159).

Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada rencana secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Agar dapat melakukan tugasnya maka seorang evaluator rencana dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen rencana.<sup>34</sup>

#### **E. Spesifikasi Perencanaan Pendidikan Islam**

Sebagai sebuah proses manajemen, perencanaan juga memiliki karakteristik atau spesifikasi yang akan disesuaikan dengan bentuk dan karakter organisasi tersebut. Beberapa jenis perencanaan pendidikan Islam yaitu:

- 1 Perencanaan Pendidikan Adaptif; Perencanaan ini terjadi karena adanya tanggapan pada suatu pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Dalam pengertian sempit, perencanaan tersebut berarti pemecahan masalah. Perencanaan ini dapat dengan mudah dan cepat difahami oleh semua pihak. Tujuannya

---

34 Saiful Sagala, Manajemen, h. 56.

- adalah mempertahankan keseimbangan organisasi.
- 2 Perencanaan Pendidikan Kontingensi; Perencanaan ini merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang tidak terpengaruh dengan biaya.
  - 3 Perencanaan Pendidikan Kompulsif; yaitu menentukan perincian mengenai apa yang harus dan akan dilakukan. Alat utamanya ialah imbalan jika berhasil dan hukuman jika tidak berhasil.
  - 4 Perencanaan Pendidikan Manipulatif; Yaitu mengandalkan berbagai jenis instrumen untuk mendapatkan suatu keuntungan. Alatnya adalah kesepakatan, pertukaran, dan upaya mempengaruhi orang lain.
  - 5 Perencanaan Pendidikan Indikatif; Yaitu menyebarkan informasi kepada individu dengan harapan akan mengambil tindakan yang tepat.
  - 6 Perencanaan Pendidikan Bertahap; merupakan perencanaan yang mengambil langkah pendek dan mengoreksi kesalahan saat perencanaan itu dilaksanakan.
  - 7 Perencanaan Pendidikan Otonomi; merupakan perencanaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan bukan sebagai bagian dari perencanaan lainnya.
  - 8 Perencanaan Pendidikan Amelioratif; Perencanaan ini dirancang untuk memulihkan pada keadaan semula, tanpa pertimbangan mengenai apa yang mungkin terjadi.
  - 9 Perencanaan Pendidikan Normatif; merupakan perencanaan jangka panjang untuk 25 sampai 40

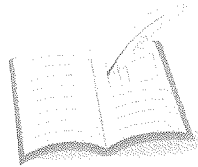
tahun kedepan. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang umum. Dan fungsinya adalah untuk membentuk pedoman dan arahan untuk perencanaan.

- 10 Perencanaan Pendidikan Fungsional; Perencanaan ini memusatkan pada aspek tertentu dari seluruh masalah. Pada dasarnya jenis permasalahan ini sifatnya tersegmentasi tetapi tetap berfungsi sebagai pelengkap dari perencanaan total.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perencanaan pendidikan Islam menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan dan memberikan kejelasan arah dalam segenap usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen usaha pendidikan akan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan siap kerja, tumbuhnya sinergi dari berbagai institusi. Perencanaan pendidikan harus berorientasi terhadap program siswa yang terstruktur dengan kondisi yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Perencanaan pendidikan dipandang perlu untuk melibatkan stake holder yang ada di masyarakat.

# BAB 4

## MODEL DAN METODE PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM



**P**erencanaan (*planning*) sebagai langkah pertama dalam fungsi manajemen, tentunya memiliki model dan metode yang variatif sehingga akan berpengaruh besar pada upaya mengorganisasikan (*organizing*), proses kegiatan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*). Dalam merencanakan sebuah lembaga pendidikan Islam seorang *planner* harus mengetahui bagaimana patokan, rambu dan acuan dalam perencanaan sehingga sebuah lembaga yang akan berdiri dapat eksis dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperangkat perencanaan tersebut harus disusun secara sistematis agar dapat memudahkan dalam menjalankannya dan lebih memudahkan untuk mencapai tujuan, inilah dikenal dengan istilah model.

Model menyajikan ragam cara untuk melakukan analisis, sedangkan metode adalah cara melakukannya. Sehingga dengan dua aspek ini akan didapatkan sebuah perencanaan pendidikan yang matang. Lalu bagaimana konstruksi model dan metode perencanaan dalam lembaga pendidikan berbasis Islam-kemasyarakatan.

## A. Model dan Metode Perencanaan Pendidikan Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia,<sup>36</sup> model diartikan sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Secara istilah metode dapat dipahami sebagai cara yang telah diatur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan, cara belajar dan sebagainya. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolok ukur keberhasilan sesuatu kegiatan<sup>37</sup>. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. Conyers & Hills mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang bersinambungan dan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan mencapai sasaran keluaran pendidikan seperti yang diharapkan.<sup>39</sup> Sesuai dengan pengetiannya sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah

36 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), ed. 3, h. 346.

37 H. Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001), h. 35

38 Conyers & Hills, *Creative Human Resource Planning and Applications : A Strategic Approach* (New York Prectice Hall, Inc. , 1994. ), h. 36.

39 Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*,(Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta: 2010), h. 6.



perencanaan, maka ada beberapa model perencanaan yaitu:

1. Model Perencanaan Komperhensif; Model ini merupakan perencanaan komperhensif yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem dan perubahan-perubahan secara menyeluruh. Dapat juga digunakan sebagai patokan dalam perencanaan yang lebih spesifik kearah tujuan-tujuan yang lebih luas.
2. Model Target *Setting*; Model ini merupakan suatu cara perencanaan dengan proyeksi atau terget tertentu dalam kurun waktu tertentu sehingga akan tercapai apa yang diharapkan. Dalam persiapannya model ini dapat digunakan untuk: (1) menganalisis demografis dan proyeksi penduduk (2) untuk memproyeksikan *enrolmen* (jumlah siswa terdaftar) sekolah (3) untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.
3. Model *Costing* Dan Efeketifitas Biaya; Model ini melihat sebuah perencanaan yang paling baik berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi dan ekonomis. Pertimbangan daripada model ini adalah pada masalah biaya, dimana dalam pendidikan tidak bisa terlepas dengan masalah pembiayaan. Sehingga perbandingan sebuah proyek yang akan dipilih sebagai jalan keluar dari masalah perencanaan merupakan yang paling fisibel. Prinsipnya, dengan biaya yang digunakan selama proses pendidikan dalam masa tertentu dapat memberikan benefit tertentu.
4. Model *Planning, Programming, Budgeting, System*; atau biasa disebut dengan PPBS merupakan sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan, dimana dalam perencanaan tujuan harus dikembangkan pada program-program, kemudian mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan dipilih sebagai alternatif yang paling baik. Artinya dalam perencanaan

pendidikan harus melihat pada semua aspek secara komperhensif sehingga mendapatkan sebuah keputusan terbaik.

Untuk memahami PPBS secara baik, ada beberapa sifat-sifat esensial dari sistem ini. Esensi dari sistem ini adalah (a) merinci secara cermat dan menganalisis tujuan yang akan dicapai (b) mencari alternatif-alternatif terbaik untuk mencapai tujuan (c) menggambarkan pembiayaan total dari seluruh proses, baik secara langsung ataupun tidak (d) menggambarkan efektifitas dari setiap alternatif sehingga dapat lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan (e) membandingkan semua alternatif dan memilihnya, mana yang paling baik untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup>

Menurut Jujun S. Soemantri, Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut: a) Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak dicapai; b) Mencari alternative-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. c) Menggambarkan biaya total dari setiap alternative, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang; d) Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternative dan bagaimana alternative itu mencapai tujuan; e) Membandingkan dan menganalisis alternative tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan.<sup>41</sup>

---

40 Matin, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 45.

41 Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cetakan ke-5. H. 24-25.

## B. Metode Perencanaan Pendidikan

1. Metode *Mean-Ways-end Analysis* (Analisis Mengenai Alat-Cara-Tujuan); metode ini digunakan untuk meneliti berbagai macam cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam membuat sebuah perencanaan pendidikan Islam. *Means* digunakan untuk melihat sumber-sumber yang diperlukan dalam lembaga pendidikan, *ways* berhubungan dengan cara atau alternatif apa saja yang akan dirumuskan dan ditempuh, dan *end* adalah akhir atau dapat disebut sebagai tujuan yang dapat dicapai. Ketiganya memiliki hubungan yang simultan, dan harus dikaji secara timbal balik.
2. Metode *Input-Output Analysis*; metode ini dapat digunakan untuk melihat interpendensi dan interelasi komponen masukan dan keluaran. Dengan melakukan analisis input-output perencanaan pendidikan dapat menilai alternatif yang paling transformatif.
3. Metode *Econometric Analysis* ; metode ini digunakan dalam perencanaan pendidikan dengan menggunakan teori-teori ekonomi dan statistik untuk menganalisis variabel-variabel yang saling berhubungan dalam sebuah sistem. Ekonomoterik mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan ketergantungan diantara variabel-variabel itu.
4. Metode *Cause-Effect* ; yaitu dengan menganalisis sebab-akibat atau sikuen hipotetik untuk memperoleh gambaran masa depan. Metode ini sangat cocok digunakan dalam perencanaan yang bersifat strategic.
5. Metode Delphi; merupakan metode yaitu dengan mengeksplorasi asumsi-asumsi yang mendasari

sebuah penilaian tertentu melalui pencarian informasi yang lengkap. Metode ini biasanya dimulai dengan mengemukakan sebuah masalah kemudian mencari informasi-informasi terkait lainnya. Dalam penerapannya dibutuhkan seseorang dengan keahlian tertentu.

6. Metode *Heuristic*; metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematisasikan langkah-langkah dalam pemecahan masalah.
7. Metode *Life-Cycle Analysis*; metode ini digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan yang berkaitan dengan produksi, proyek, program. Langkah-langkah dalam metode ini adalah: (1) fase konseptualisasi (2) fase spesifikasi (3) fase pengembangan *prototype* (4) fase pengujian dan evaluasi (5) fase operasi (6) fase produksi.
8. Metode *Value Added Analysis*; metode ini digunakan untuk mengukur sebuah produksi dan pelayanan. Melalui analisis tersebut kita dapat mengetahui gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya.

Sedangkan menurut Husaini Usman menambahkan metode perencanaan yaitu:

- a. Metode Proyeksi; merupakan metode prakiraan untuk memperkirakan jumlah penduduk lima tahunan, data persekolahan, data penduduk dan penduduk

usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi kelas dan proyeksi kebutuhan guru. Ada 4 metode proyeksi, yaitu (1) proyeksi pertumbuhan siswa, (2) kohort, (3) masukan dan keluaran, dan (4) arus. Untuk dapat memproyeksikan pertumbuhan siswa setiap tahunnya dapat digunakan rumus:

Keterangan:

$AP_n$  = Angka Pertumbuhan siswa tahun  $n$

$S_{n-1}$  = Siswa tahun  $n-1$

$S_{n-2}$  = Siswa tahun  $n-2$

- b. Metode kedua adalah *kohort*. Kohort adalah satu angkatan siswa yang masuk kelas 1 sampai tamat sekolah. Pada metode ini akan dilihat jumlah masukan dan keluaran siswa dari awal masuk sampai lulus, bagaimana jumlah mereka pada tiap tingkatnya, apakah tercapai memenuhi target lulus 100% atau tidak, jika tidak berapa persen.
- c. Metode arus siswa, metode ini hingga saat ini dianggap yang paling tepat dan mendekati kenyataan. Sebab metode ini mengontrol hasil proyeksi 3 arus dari setiap tingkat, yaitu angka mengulang, angka naik kelas, dan angka putus sekolah. Proyeksi dengan metode ini adalah paling lengkap dibandingkan dengan proyeksi menggunakan metode lain.
- d. Metode Pemecahan Penduduk Lima tahunan Menjadi Tahunan; metode ini penting digunakan dalam perencanaan pendidikan. Dengan metode ini maka akan dihitung interval usia anak dalam masa persekolahan. Misal pada saat MI berumur 7-12 tahun, MTs, 12-14 dan seterusnya.

### C. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan berbasis masyarakat menjadi pasal yang sangat menarik. Kartini Kartono menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat tidak lepas dari unsur politik.<sup>42</sup> Pendidikan berbasis masyarakat juga diartikan sebagai bahwa pendidikan “berbasis” adalah milik masyarakat berupa adanya pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan, kurikulum, dan materi belajar, standar ujian, guru dan kualifikasinya persyaratan siswa, dan lain-lain.

Terdapat cara untuk memetakan pendidikan berbasis masyarakat dengan memplot derajat pengendalian masyarakat. Indikator-indikatornya adalah: dukungan (*support*) orang tua atau masyarakat memberikan sumbangan dana atau tenaga, keterlibatan (*involvement*) orang tua atau masyarakat lainnya dalam pengambilan keputusan, kemitraan (*partnership*) orang tua dan masyarakat menjali hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah berhubungan dengan tujuan program, alokasi dana, dan ketenagaan, dan kepemilikan penuh (*full ownership*) para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan program.

Peran pemerintah dalam pendidikan berbasis masyarakat ini adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, sebagai penyandang dana. Sehingga pemerintah menjadi faktor kesekian dalam proses pembelajaran,

---

42 Kartini Kartono *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti. Cet. I*; (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 30.

dan sekolah mengandalkan pada manajemen berbasis sekolah.<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. Dalam konteks kepemilikan, PBM dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan.<sup>44</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dengan diadakannya fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya.

1) Pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam Indoensia merupakan bentuk nyata dari PBM. Dalam sistem dan lingkup pesantren segala dilaksanakan dan diselengggrakan oleh semua pihak di pesantren tersebut. Kyai sebagai sentral dalam pesantren merupakan representasi

---

43 Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Cet. I; (Magelang: Indonesiatara, 2003), h. 57.

44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dari masyarakat yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur segala hal dalam pesantrennya bersama para pengurus (yayasan). Struktur yang ada dalam pesantren tidak dibangun dari basis pemerintah melainkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Manajemen, kurikulum, pembiayaan, metode, dan sebagainya dikembangkan sendiri oleh pesantren tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dan secara struktural membawahi pesantren; contohnya Pondok Modern Gontor Ponorogo di Jawa Timur

- 2) PBM yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti kursus bahasa Inggris di daerah kecamatan Pare kabupaten Kediri-Jawa Timur. Dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut, semua penyelenggaraan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, murni merupakan inisiatif dari masyarakat (pemilik dan pengelola lembaga kursus), kampung Bahasa Arab di Purwokerto dekat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Jawa Tengah.
- 3) Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan implemementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.



#### D. Model dan Metode Perencanaan Sekolah Berbasis Islam-Kemasyarakatan

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU no 20 tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejatinya manusia yang telah dibekali dengan ilmu pengetahuan baru akan dihitung kemanfaatannya setelah dapat mengamalkan ilmunya bagi orang disekitarnya.<sup>45</sup>

Pendidikan Islam mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik yaitu dengan mencirikan manusia yang paling banyak memiliki nilai manfaat buat orang lain, untuk itulah Pentingnya responsibilitas sosial dalam Islam yaitu intuk menjamin terbentuknya fondasi-fondasi yang kuat bagi masa depan masyarakat yang Islami berdasarkan Alquran dan hadits.<sup>46</sup> Pada sisi lain, hasil dari pendidikan seharusnya membuahkan perubahan bagi masyarakat luas. Pendidikan bagi anak-anak dapat menjadi alternatif yang baik untuk memajukan masyarakat menjadi masyarakat madani. Persoalan dimasyarakat dapat dipecahkan dan diselesaikan karena orang-orang yang berpendidikan, dimana sebagai orang terdidik memiliki perbedaan cara pandang dan berfikir.

Banyak permasalahan di masyarakat tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendidikan, disebabkan karena pendidikan tidak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat secara mendetail. Sedangkan pendidikan Islam justru memiliki fokus sebagai *problem solver*

45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

46 Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 45.

di masyarakat. Untuk itulah penting mendesain perencanaan lembaga pendidikan berbasis Islam-Kemasyarakatan dengan menelisik model dan metode terbaik.

Secara teori dan praktik, tujuan sekolah berbasis Islam-Kemasyarakatan adalah (a) menumbuhkan jiwa sosial yang peka terhadap permasalahan di masyarakat (b) menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap masyarakat (c) menciptakan generasi yang siap terjun di masyarakat dengan *hard* dan *soft skill* nya (d) menciptakan generasi Islam yang memiliki nilai tinggi pada aspek keagamaan yang matang dalam ilmu dan amal. Pada tataran praktik, pendidikan Islam bisa menjadi khazanah untuk merubahn dan memperbaiki persoalan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat baik dalam kawasan kota maupun desa. Dengan demikian mereka akan belajar bagaimana menghadapi masalah tersebut. Tentu dari jenjang yang paling rendah pengajarannya harus lebih sederhana.

Jika menggunakan metode *cause-effect* (sebab-akibat), maka cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan agar siswa memiliki jiwa sosial yang peka terhadap masalah masyarakat adalah: melibatkan dalam kegiatan masyarakat. Seperti kerja bakti, mengurus pemberdayaan masjid, mengurus jenazah, memperbaiki saluran irigasi petani, rapat dengan pihak desa dan lain sebagainya. Pengalaman riil tersebut dibutuhkan bagi siswa nanti saat dewasa bagaimana bermasyarakat mengurus kepentingan umum di masyarakat. Sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku sekolah baik yang bersifat teoritis dan praktis langsung dapat digunakan jika dibutuhkan.

Untuk mempersiapkan generasi yang bertanggung jawab dan siap terjun di masyarakat dengan *hard* dan *soft skill* yaitu dengan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dan *skill* apa

saja yang di butuhkan di masyarakat. Paling sederhana adalah mereka diajarkan menjadi imam shalat, sampai pada masalah yang membutuhkan keahlian khusus seperti pembuatan tata ruang desa, sarana irigasi, perencanaan program desa dan lain sebagainya. Terakhir adalah ingin menjadikan manusia yang memiliki nilai tinggi pada aspek keagamaan serta matang dalam bidang ilmu dan amal. Cara yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan pengajaran yang berorientasi kognitif membangun pengetahuan agama seputar ibadah yang berdampak pada amalan sehari-hari.

Untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan berbasis Islam-Kemasyarakatan maka dapat digunakan metode *Mean-Ways- end Analysis*. *Mean* yang dimaksud adalah apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga ini, maka dapat dibuat semacam tabel kebutuhan : pendanaan, kurikulum, SDM, dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan *Ways* yaitu strategi atau cara yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam kebutuhan di atas. Masalah pendanaan di mana penggunaannya untuk tahap awal seperti; pembangunan, pembuatan kelengkapan administrasi kelembagaan, dan perlengkapan sarpras. Sedangkan untuk tahap lanjut seperti; operasional sekolah, gaji SDM, media pembelajaran, kerja sama, dan lain-lain. Pada tahap awal pendanaan dapat menggunakan cara; swadaya oleh rekan dan kerabat terdekat, bantuan pemerintah. Sedangkan untuk tahap lanjut cara yang dapat digunakan seperti melakukan kerjasama CSR, bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, pengembangan usaha sekolah, bantuan dana desa, orang tua siswa. Cara di atas dapat digunakan salah satunya, dengan memilih alternatif mana yang paling baik untuk segera ditindak lanjuti.

Kurikulum sekolah berbasis Islam-Kemasyarakatan dapat disusun melalui bantuan konsultan sekolah, dengan dibantu masyarakat umum, sedangkan penggagas atau pendiri hanya membuat beberapa rambu-rambu kurikulum. Dilibatkannya jasa konsultan kurikulum yaitu mempertimbangkan efektifitas waktu dan ketajaman kurikulum yang diharapkan karena dikerjakan oleh ahlinya. Sedangkan tanpa melibatkan konsultan dan hanya mengandalkan SDM guru baru akan menyulitkan dalam eksekusi pembelajara karena belum tentu guru baru memiliki pengalaman teknis pada persoalan kurikulum.

Kemudian untuk mendapatkan SDM yang diharapkan, akan mulai dilakukan rekrutmen guru dengan kriteria tertentu, seperti mempunyai kecakapan dalam *hardskill* dan *softskill*, Islami, berpengetahuan agama, punya jiwa sosial, bergabung dalam kepengurusan desa, dan lain-lain. Selain itu, sekolah juga akan melibatkan tokoh masyarakat untuk masuk dalam beberapa kegiatan pembelajaran seperti pengenalan program desa dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kepala desa juga dapat terlibat menjadi bagian dari sekolah untuk membantu baik proses pembelajaran maupun dalam kebijakan-kebijakan tingkat desa.

Konsep sekolah yang bermasyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat, untuk itu diperlukan penyambutan yang baik dari masyarakat sekitar terhadap seluruh proses pembelajaran. Cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan kerjasama dengan aparat desa, sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan kelompok kerja desa (kelompok tani, PKK, dan lain-lain). Diharapkan dengan pengertian dan kerjasama yang baik para siswa dapat melakukan pembelajaran dengan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pertanian,

perdagangan, kerajinan, dan lain-lain.

Melalui serangkaian aktifitas baik secara kelembagaan dan kurikulum diharapkan dapat mencapai *end*. Analisis terhadap hasil *output* dapat dilihat pada tiap tahun dan apa akhir jenjang sekolah. Apakah akan ada perbaikan dan penambahan terhadap seluruh proses atau tidak bergantung pada hasil evaluasi dan analisis secara menyeluruh.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa model perencanaan dapat diartikan sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Sedangkan metode perencanaan diartikan sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah perencanaan

Ada beberapa model perencanaan pendidikan, yaitu:

1. Perencanaan komperhensif
2. Target setting
3. Costing dan efektifitas biaya
4. Model planning, programming, dan budgeting system.

Sedangkan beberapa metode perencanaan pendidikan yaitu:

- a. Metode *Mean-Ways- end Analysis*
- b. Metode *Input-Output Analysis*
- c. Metode *Economotric Analysis*
- d. Metode *Cause-Effect*
- e. Metode Delphi
- f. Metode *Heuristic*
- g. Metode *Life-Cycle Analysis*
- h. Metode *Value Added Analysis*

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan, dan komite sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai Stakeholder.<sup>48</sup> Stakeholder terbagi menjadi dua yaitu dan eksternal, stakeholder internal atau dari dalam secara prinsipal relatif lebih mudah dikendalikan dan ruang lingkup pekerjaannya lebih kepada membangun komunikasi internal antar personalia sekolah atau madrasah, hal ini karena stakeholder internal memiliki hak dan kewenangan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di dalam sekolah tersebut, secara manajerial stakeholder internal lebih sering diamanatkan kepada wakil kepala sekolah atau madrasah atau dirangkap langsung oleh kepala sekolah atau madrasah.

Adapun stakeholder eksternal merupakan unsur-unsur yang berada di luar kendali sekolah atau madrasah, peserta didik dan orang tua merupakan salah satu stakeholder eksternal, hal ini karena posisi mereka layaknya konsumen sekolah atau madrasah yang perlu mendapatkan layanan belajar yang berkualitas meskipun harus diketahui bahwa hakikatnya pendidikan dan lembaga pendidikan formal berbentuk nirlaba atau bukan mencari keuntungan. Berbeda dengan stakeholder sekolah dan pemerintah yang terlibat langsung dalam sistem pendidikan, masyarakat termasuk dalam bagian diluar lingkaran sistem pendidikan tetapi berkaitan secara tidak langsung pada aktor pendidikan didalamnya. Perbedaan ini penting untuk diketahui bahwa masyarakat, stakeholder eksternal pendidikan, tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar dari sekolah dan pemerintah dalam menghasilkan

48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

perubahan pendidikan. Masyarakat yang dimaksud terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah orang tua murid, lembaga swadaya masyarakat (LSM), toko buku, ataupun perusahaan yang membutuhkan tenaga terdidik, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Secara rinci dalam pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang menjelaskan bahwa mengenai stakeholder, yaitu:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan

Dalam konteks yang lain, Clarkson membagi stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder Primer adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung resiko. Contoh: investor, kreditor, karyawan, pemerintah, dan komunitas local. Sedangkan

---

49 Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 143.

Secara yuridis, pada tahun 2010 an dikenal istilah Komite Sekolah/Madrasah<sup>55</sup> dan Dewan Pendidikan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 5 peran, yaitu :

1. Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat (*Advisory Agency*)
  - a. Pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan.
  - b. Memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa.
  - c. Memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan member solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru.
  - d. Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa.
2. Peran sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*) berkaitan dengan internal manajemen sekolah:
  - a. Mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan, mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan.
  - b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan.
  - c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite sekolah.
  - d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan.

---

<sup>55</sup> Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah*, 81.



- e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengikuti berbagai perlombaan yang dilakukan sekolah.
  - f. Untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat disekolah.
  - g. Mendukung pemanfaatan sarana prasarana untuk memberikan layanan belajar.
  - h. Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar.
  - i. Memaksimalkan anggaran operasional yang bersumber dari APBD, bantuan masyarakat, dan mendorong penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang tepat sasaran.
3. Peran sebagai pengontrol (*Controlling Agency*) pendidikan dan komite sekolah, sebagai badan pengawas terhadap kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Fungsi pengontrol (*controlling agency*) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan aktifitas;
- a. Menanyakan proses belajar mengajar (ke guru dan kepala sekolah) apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan.
  - b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik.
  - c. Memantau pelaksanaan rencana kegiatan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan tahunan (RKT).
  - d. Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT.
  - e. Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS.
  - f. Ikut serta dalam rapat pembagian raport.
  - g. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

lainnya.

h. Mengontrol pelaksanaan PBM.

4. Peran sebagai penghubung (Mediating Agency).

5. Peran sebagai pelaku (Actor agency).<sup>56</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 2010 disebutkan pembentukan komite sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di tingkat pendidikan; (b) meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses pembentukan Komite Sekolah, yakni: (a) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis; (b) Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan.<sup>57</sup>

Dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa itu Komite Sekolah, diantaranya tentang beberapa hal, antara lain:

a) Tugas Komite Sekolah adalah: 1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; 3) mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, 4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritisi

<sup>56</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002  
<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

- aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah;
- b) Unsur komite, maka yang dapat menjadi unsur anggota Komite Sekolah: orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan; tokoh masyarakat; pakar pendidikan;
  - c) Pihak yang dilarang atau tidak boleh menjadi anggota Komite Sekolah. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur: 1) pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan; penyelenggara Sekolah yang bersangkutan; pemerintah desa; forum koordinasi pimpinan kecamatan; forum koordinasi pimpinan daerah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
  - d) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - e) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan;
  - f) Sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan;
  - g) Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan;

daya manusia organisasi, konsumen/citizen dan pihak lain yang terkait). 3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.<sup>62</sup>

Rancangan lembaga pendidikan dengan mengemukakan indikator-indikator yang telah disepakati menjadi daya saing pendidikan secara kualitatif terutama prestasi belajar atau mutu lulusan peserta didiknya. Mutu pendidikan ini masih menjadi perdebatan, akan tetapi pada lingkup persekolahan maka mutu biasanya diukur dari aspek yang ditunjukkan prestasi yang memuaskan dalam materi pelajaran.<sup>63</sup> Rancangan visi madrasah/lembaga pendidikan Islam harus selaras dengan visi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membimbing dan menuntun manusia ke jalan kebenaran, mewujudkan manusia menjadi hamba Allah dan menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya sebagai pengabdian kepada-Nya.<sup>64</sup>

Oleh sebab visi adalah suatu pandangan yang merupakan kristalisasi dan intisari dari suatu kemampuan (competence), kebolehan (ability), dan kebiasaan (self efficacy) dalam melihat, menganalisis, dan menafsirkan, maka visi atau wawasan harus berupa penglihatan yang mendalam, mengandung pengetahuan (kognitif), kecintaan (afektif), dan kepedulian terhadap profesi serta kemampuan

---

62 Akdon, *Strategis Managemen for Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 45.

63 Jamaluddin Idris, *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), h. 4-5.

64 QS. Ad-Dzariat: 56. Visi beribadah sebagaimana pada ayat tersebut memiliki kesamaan dengan visi pendidikan Islam dan merupakan cerminan dari visi kerasulan para Nabi, mulai dari visi kerasulan Nabi Adam hingga kerasulan Nabi Muhammad, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah (QS. 7:66, 73:29;16) serta membawa seluruh rahmat bagi seluruh alam (QS. 21:107; 27:77).

(konatif).

Manfaat visi adalah memotivasi warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program rutin dan program pengembangan.<sup>65</sup> Visi adalah kunci energi manusia, kunci atribut pemimpin dan pengambil keputusan/kebijakan. Visi merupakan inti sekaligus sumber kegiatan sekolah atau organisasi. Selanjutnya, rumusan visi dari "salah satu gabungan tiga hal, yaitu (1) apa yang ingin kita capai di masa depan (what do we want to attain), (2) apa yang ingin kita peroleh di masa depan (what do we want to have), dan (3) kita ingin menjadi apa di masa depan (what do we want to be).<sup>66</sup> Visi menciptakan masa depan dengan menggabungkan fakta, harapan, impian, bahaya, dan peluang.<sup>67</sup>

Bagi Akdon ada beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain: 1. Visi bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. 2. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. 3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 4. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. 5. Gambar yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 6. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.<sup>68</sup>

Visi juga harus dikaitkan dengan karakteristik rumusan visi madrasah adalah: (1) dapat dibayangkan oleh semua warga madrasah, (2) memiliki nilai yang memang

65 Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 254

66 A.B. Susanto, *Visi & Misi: Langkah Awal Menuju Strategic Management* Cetakan II, (Jakarta: The Jakarta consulting Group, 2008), h. 15.

67 Cynthia D. Scott, dkk., *Organizational Vission, and Mission*, terj. At Cahayani, *Visi, Nilai, dan Misi organisasi*, (Jakarta: Indeks, 2010), h. 3.

68 Akdon, *Strategis Managemen fo*

investasi emosional dari semua stakeholder madrasah.<sup>73</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi yaitu :

1. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah.
2. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan "tindakan" dan bukan kalimat yang menunjukkan "keadaan" sebagaimana pada rumusan visi.
3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas.
4. Misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat (siswa)
5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi.

Rumusan misi yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi/satuan kerja;
- b) Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas;
- c) Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan;
- d) Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- e) Memungkinkan untuk perubahan/penyesuaian dengan perubahan visi.

Bagaimana kaitan antara visi dengan misi, dapat dirumuskan bahwa kalau visi merupakan pernyataan

---

73 A.B. Susanto, *Visi & Misi*: h. 20-22.

mengenai gambaran global masa depan maka misi merupakan pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan diwujudkan berupa ide, cita-cita atau wawasan dan gambaran di masa depan dalam jangka panjang maka misi merupakan upaya untuk konkretisasi visi dalam wujud tujuan dasar yang akan diwujudkan dalam jangka menengah dan pendek. Visi merupakan penjabaran atau spesifikasi visi dan misi pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi lokal sehingga dimungkinkan untuk mengembangkan visi dan misi dari beberapa madrasah yang berada dalam suatu cluster madrasah berbeda dengan daerah lainnya.

Dalam pembuatan misi, penting untuk diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Misi harus mampu menggambarkan sebagai kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut sekolah/madrasah.
- b. Statemen misi harus berorientasi ke masa depan dan mampu menggambarkan sekolah/madrasah pada masa yang akan datang dengan perpijak pada apa yang telah ada.
- c. Statement misi harus focus pada pencapaian visi.
- d. Statement visi bukan sesuatu yang umum, tetapi khusus berlaku untuk sekolah/madrasah tertentu.
- e. Statement misi merupakan statement yang singkat dan padat tidak lebih dari dua kalimat.<sup>74</sup>

### **C. Perumusan Tujuan Sebagai Implementasi Dari Misi**

Setelah disepakati rumusan visi dan misi, maka hal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah

---

74 Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.166

merumuskan tujuan dari pendidikan di lembaga ini. Setelah dirumuskan visi, misi dan prinsip selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, tujuan dikaitkan dengan jangka waktu yang pendek, yaitu  $\pm 3$  s/d 5 tahun.

Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud Sekolah menuju visi yang telah dicanangkan. Jika visi merupakan gambaran sekolah dimasa depan secara utuh (ideal), tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 s.d 5 tahun mungkin belum seideal visi atau belum selengkap visi. Dengan kata lain, tujuan dapat terwujud sebagian dari visi.

Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan akan strategis, arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan sekolah, yaitu: 1. Tujuan sekolah harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel (dapat diukur). 2. Tujuan sekolah merupakan penjabaran dan misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. 3. Tujuan sekolah menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya.

Dengan adanya perumusan visi dan misi pendidikan di Madrasah/sekolah, maka cita-cita masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan



memperoleh pendidikan dengan mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.<sup>75</sup>

Perumusan tujuan pendidikan di sekolah/Madrasah merupakan bagian dari karakteristik kebijakan pendidikan yaitu: 1) Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. 2) Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. 3) Memiliki konsep operasional; kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan.<sup>76</sup>

---

75 Saiful Sagala, "Pengantar", *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta. 2013), h. vi.

76 Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

# BAB 7

## PERENCANAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ISLAM



**P**erencanaan (*planning*) adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya.<sup>77</sup> Dimana perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilalui dalam semua proses manajemen baik dalam instansi pendidikan maupun instansi lainnya. Suatu rencana yang baik ialah yang mampu menjawab pertanyaan 5W 1H.<sup>78</sup> Perencanaan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan yang matang dapat meminimalisasi kemungkinan terjadi kesalahan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan, pengaturan, penggunaan dan penghapusan sarana prasarana pendidikan.<sup>79</sup>

---

77 Agus Sabardi, Manajemen Pengantar (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2008) 210.

78 Niken Ristianah, Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi di PAUD Darush Sholihin Tanjunganom Nganjuk, Jurnal INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 1, Oktober 2018, h.1-13. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/48/38>

79 Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)51.

## A. Sarana Dan Prasana Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam, sarana dikenal dengan beberapa terminology seperti al'alat,. Secara kebahasaan, sarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alatdalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media.<sup>80</sup> Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata)prasaranaberarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan.<sup>81</sup> Nah, sarana MenurutIbrahim Bafadal bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.<sup>82</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan,khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efesien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannyaproses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalanmenuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secaralangsung untuk proses belajarmengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolahsebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

E. Mulyasa, menyebut saranapendidikan adalah peralatan

- 
- 80 TimPenyusun,*KamusBesarBahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi Ke-3 ,h. 700.
- 81 M. Daryanto,*Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Cet. IV, h. 51
- 82 Ibrahim Bafadal, *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Cet. I, h. 3.

dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.<sup>83</sup> Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.<sup>84</sup> Dasar yuridis adanya sarana prasarana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2 dinyatakan d: a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. b. Dari setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

---

83 E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. VII, h. 49.

84 Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), Cet. II, h. 81.

## B. Fungsi Jenis Dan Sifat Sarana Prasarana

Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis atau sifatnya, yaitu: *Pertama*, Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM. Sarana dan prasarana pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan dan ada yang berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM. prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan), termasuk dalam prasarana pendidikan ini adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalan, air, listrik, telepon, serta perabot/mobiler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media pendidikan.

*Kedua*,

Ditinjau dari jenisnya. Fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas nonfisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang.

*Ketiga*, ditinjau dari sifat barangnya. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas. Barang bergerak atau barang berpindah/dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis-pakai dan

barangtak habis pakai.

- 1) Barang habis-pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan, dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tukis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu dan sebagainya. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971).
- 2) Barang tak-habis-pakai ialah barang-barang yang dapat dipakai berulang kali serta tidak susut volumenya semasa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap-pakai untuk pelaksanaan tugas, seperti mesin tulis, komputer, mesin stensil, kendaraan, perabot, media pendidikan dan sebagainya.
- 3) Sedangkan barang tidak bergerak ialah barang yang tidak berpindah pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan/gedung, sumur, menara air, dan sebagainya.<sup>85</sup>

### C. Sarana Dan Prasarana Dalam Proses Belajar Mengajar

Menurut Nawawi (1987), dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. *Pertama*, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai contohnya adalah kapur tulis, atlas dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. *Kedua*, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor sekolah merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru

<sup>85</sup> Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro*, Jakarta: PTRineka Cipta, 1996), Cet. I, h. 115.

dalam proses belajar mengajar. Sedangkan bila tinjau dari fungsi dan peranannya dalam proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi: *Pertama*, Alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Alat ini mungkin berwujud buku tulis, gambar-gambar, alat-alat tulis-menulis lain seperti kapur, penghapusan dan papan tulis maupun alat-alat praktek, semuanya termasuk ke dalam lingkup alat pelajaran.<sup>86</sup>

Kedua, Alat peraga. Alat peraga mempunyai arti yang luas. Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan dari yang tingkatannya paling konkrit sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian (penyampaian konsep) kepada murid. Di samping itu, alat peraga sangatlah penting bagi pengajar untuk mewujudkan atau mendemonstrasikan bahan pengajaran guna memberikan pengertian atau gambaran yang jelas tentang pelajaran yang diberikan. Hal itu sangat membantu siswa untuk tidak menjadi siswa verbalis.<sup>87</sup>

Dengan bertitik tolak pada penggunaannya, maka alat peraga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: a)Alat peraga langsung, yaitu jika guru menerangkan dengan menunjukkan benda sesungguhnya (benda dibawa ke kelas, atau anak diajak ke benda);<sup>88</sup> b)Alat peraga tidak langsung, yaitu jika guru mengadakan penggantianterhadap benda sesungguhnya. Berturut-turut dari yang konkrit ke

86 B.Suryo Subroto, *Administrasi Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998),Cet. II, h. 75.

87 Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Materil* (Jakarta: PT. Prima Karya, 1987), Cet. I,h.10.

88 Subari, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. I, h. 95.

yang abstrak, maka alat peraga dapat berupa: Benda tiruan (miniatur), Film, Slide, Foto, Gambar, Sketsa atau bagan. Disamping pembagian ini, ada lagi alat peraga atau *peragaan yang berupa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Sebagai contoh jika guru akan menerangkan bagaimana orang: berkedip, mengengadah, melambaikan tangan, membaca dan sebagainya, maka tidak perlu menggunakan alat peraga. Tetapi ia memperagakan.*<sup>89</sup>

*Ketiga*, Media pengajaran. Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.<sup>90</sup> Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Oleh karena itu, Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien (siswa) untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>91</sup>

Menurut Ramayulis, Alat/Media pendidikan atau pengajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab alat/media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Adanya alat/media bahkan dapat mempercepat proses pembelajaran murid karena

---

89 Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Materi*, h. 14.

90 Arief S. Sadiman, dkk., *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. I, h. 6.

91 Asnawirdan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pers., 2002), Cet. I, h. 11.



dapat membuat pemahaman murid lebih lebih cepat pula.<sup>92</sup> Media pendidikan mempunyai peranan yang lain dari peraga.

Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara di dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektifitas dan efesiensi, tetapi dapat pula sebagai pengganti peranan guru. Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.

Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.<sup>93</sup>

#### **D. D. Sarana Dan Prasarana Dalam Konteks Pendidikan Islam**

Dalam Alquran juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam Alquran juga bisa menjadi alat dalam

---

92 Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Cet. IV, h. 180.

93 Azhar Arsyad, *Media Pengajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. II, h.15-16.

pendidikan. Seperti an-Nahl yang artinya lebah, pada ayat ke 68-69 di surat itu Allah menerangkan yang artinya adalah sebagai berikut: *Allah mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.*<sup>94</sup>

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda. Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar. *Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah membuatkan kami garis dan bersabda, "Ini jalan Allah." Kemudian membuat garis-garis di sebelah kanan dan kirinya, dan bersabda, "Ini adalah jalan-jalan (setan)." Yazid berkata, "(Garis-garis) yang berpencah-pancah." Rasulullah SAW bersabda, "Di setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat Alquran (Q.S.*

---

94 QS. An-Nahl ayat 68 – 69.

al-An'am/6: 153).yang artinya adalah sebagai berikut : *Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) , karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.*<sup>95</sup>

Hadis di atas terlihat jelas bahwa Rasulullah SAW menggunakan garis-garis sebagai alat pendidikan untuk menjelaskan apa yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Perlu pula ditegaskan bahwa dalam konteks pendidikan Islam, M. Arifin menyebutkan alat-alat pendidikan harus mengandung nilai-nilai operasional yang mampu mengantarkan kepada tujuan pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut tentunya berdasarkan kepada dasar atau karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Dewasa ini, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan semakin pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam juga tetap melakukan berbagai inovasi termasuk dalam pengembangan penggunaan alat pendidikan sehingga membantu kelancaran proses pendidikan tersebut. Namun penggunaan alat tersebut mesti tetap berlandaskan kepada dasar-dasar pendidikan Islam dan mengacu kepada tujuan yang telah direncanakan.

Dalam kegiatan perencanaan sarana prasarana pendidikan (Depdiknas, 2009:8-9), ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha

---

95 Q.S. Al-An'am ayat 153.

peningkatan kualitas belajar mengajar;

b) Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada hal-hal berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan biaya/ harga keperluan pengadaan;
  - 2) Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - 3) Petugas pelaksana, misalnya guru, karyawan, dan lain-lain;
  - 4) Bahan dan peralatan yang dibutuhkan;
  - 5) Kapan dan dimana pelaksanaan dilaksanakan;
  - 6) Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan;
  - 7) Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan;
  - 8) Mengikuti pedoman (standar) jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan;
  - 9) Mengikuti prosedur yang berlaku;
  - 10) Mengikut sertakan unsur orang tua murid;
  - 11) Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, kondisi yang tidak disangka-sangka. Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun)
- Manfaat perencanaan, yaitu: dapat membantu menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat

dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Tujuan Perencanaan Sarana dan Prasarana Adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan.

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus betul-betul merupakan program intelektual;
2. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah;
3. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran;
4. Visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.<sup>96</sup>

Disamping kita harus memenuhi prinsip-prinsip diatas, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut: a).Kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan b).Kesesuaian

---

<sup>96</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004.) h. 37.

dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan; c).Mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif; d).Jenis alat atau barang yang diperlukan harus tepat dan dapat meningkatkan efesiensi kerja.

Menurut Bafadal, dalam manajemen sarana dan prasarana yang sekaligus merupakan dari langkah pengadaan memiliki beberapa proses sebagai berikut:

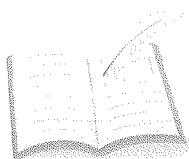
1. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisir kekurangan kelengkapan sekolah.
2. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu ajaran.
3. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Dalam rangka itu perencana informasi tahu tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu jalan adalah dengan membaca buku inventaris atau buku induk barang. Berdasarkan panduan tersebut lalu disusun rencana kebutuhan perlengkapan, yaitu mendaftar yang belum tersedia di sekolah;
4. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan

yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas.

5. Penetapan rencana pengadaan akhir.

# BAB 8

## PERENCANAAN TENAGA PENDIDIKAN



**D**alam pendidikan terdapat dua istilah yang sering disalahartikan terkait dengan subjek pelaku dalam pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, padahal salah satu faktor dalam kemajuan dan kesuksesan sebuah sistem pendidikan adalah tenaga pendidik yang mengalami beberapa terminologis seperti guru dan pendidik, di samping tenaga kependidikan tentunya. Tenaga kependidikan di dalam sekolah atau madrasah dikenal dengan dua istilah, yaitu tenaga pendidik/pengajar dan juga tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan atau sumber daya manusia baik pengajar atau pun tenaga kependidikan non pengajar memiliki peranan dalam dunia pendidikan. Hal ini karena manusia dalam proses pendidikan merupakan subjek dan objek utama. Hal ini karena dalam realitas sejarah bahwa kultur masyarakat manapun berkepentingan mengarahkan manusia kepada tujuan-tujuan tertentu.

Pada era globalisasi ini, sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting, karena kontribusi sumber daya manusia dinilai sangat signifikan dalam pencapaian tujuan



organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki secara tepat dan relevan maka aktivitas yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika suatu organisasi. Perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan (sumber daya manusia) yang berkomprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi dimasa depan.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Dalam sistem pendidikan nasional, organisasi yang bergerak dalam sistem tersebut merupakan sub sistem yang memiliki sumber daya manusia yang perlu dikelola secara tepat. Secara nyata mereka adalah para tenaga kependidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi pendidikan yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di tingkat nasional, pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi dan pemberhentian yang tepat.

#### **A. Pengertian Tenaga Kependidikan**

Undang-undang No. 20 Pasal 1 Ayat (5) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. UU No. 20 Pasal 39 Ayat (1) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan.<sup>97</sup>

Ppendapat lain tentang pengertian dari tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 1, dinyatakan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun dengan tetap dalam kondisi yang menyenangkan.<sup>98</sup>

## B. Perencanaan Tenaga Kependidikan

Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga

---

97 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

98 *Ibid.*

kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, misalnya:

1. Expert estimate yaitu prediksi yang dilakukan oleh para ahli karena para ahli ini dianggap lebih memahami tuntutan-tuntutan ketenagakerjaan.
2. Historical comparison yaitu prediksi yang didasarkan atas kecenderungan yang terjadi pada masa sebelumnya.
3. Task analysis yaitu penentuan kebutuhan tenaga didasarkan atas tuntutan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.
4. Correlation technique suatu penentuan kebutuhan didasarkan atas perhitungan-perhitungan korelasi secara statistik, terutama kepentingan yang menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi dalam persyaratan-persyaratan ketenagakerjaan, sumber-sumber keuangan dan program-program yang ditetapkan.
5. Modelling yaitu penetapan kebutuhan tenaga tergantung pada model keputusan yang biasa dibuat.

Perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar berhasil yang dicapai sesuatu dengan yang diharapkan. Dengan perencanaan pula, berbagai langkah dalam mencapai tujuan juga ditetapkan sesuai dengan acuan dalam organisasi tersebut. Perencanaan adalah kegiatan menentukan sebelumnya sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan

untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan.

Semua orang menyadari bahwa perencanaan merupakan bagian terpenting. Oleh karena itu, perencanaan menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Untuk manajer sumber daya manusia (personalia), perencanaan berarti penentuan program karyawan dalam rangka membantu tercapainya sasaran atau tujuan organisasi itu. Dengan kata lain, perencanaan mengatur orang-orang yang akan menangani tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing orang dalam rangka mencapai tugas organisasi.

Adapun yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan

Melayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa Perencanaan Tenaga Kependidikan/ Pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Manajer lembaga pendidikan islam harus membuat perencanaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan lembaga ke depan dan mengontrol atau menghindari kesalahan penerimaan pegawai. Dalam melakukan perencanaannya manajer harus mempertimbangkan jumlah pegawai yang direncanakan, keahlian apa yang dibutuhkan, tingkat pendidikan apa yang sedang dibutuhkan, jenis keterampilan macam apa yang menjadi kebutuhan, dan lain sebagainya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Melayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 45.

Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa terlaksana sepenuhnya atau setidaknya mendekati seluruhnya. Oleh karena itu perencanaan harus didasarkan pada 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau telah mengantarkan kondisi sekarang sehingga bisa dijadikan acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan potensi yang ada. Sepanjang situasi yang dihadapi di masa lampau dan masa sekarang masih sama, maka perkembangan masa lampau yang telah mengantarkan kondisi masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama untuk memprediksi masa depan.

### **C. Hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan pegawai**

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang mengarahkan kepada tercapainya maksud dan tujuan dari pendidikan di dalam sebuah insntitusi pendidikan, hal-hal yang perlu dilakukan di dalam menentukan kriteria, kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi seorang tenaga kependidikan antara lain:

1. Uraian pekerjaan (*job description*), uraian pekerjaan merupakan doamin pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kependidikan di dalam melayani administrasi sebuah lembaga pendidikan, yang biasanya disebut dengan tugas pokok dan fungsinya. Uraian pekerjaan dimaksudkan untuk mengetahui jabatan apa yang akan diisi
2. Analisis pekerjaan (*job analysis*); analisis jabatan merupakan rekayasa jabatan yang harus disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada SOP atau satuan operasional Prosedur dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakaiti.

Analisis pekerjaan dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan, yakni tentang tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Biasanya pada awal tahun diberikan sebuah perjanjian kerja yang mengikat seorang pemangku jabatan dengan atasannya.

3. Spesifikasi pekerjaan (*specification job*); spesifikasi pekerjaan merupakan upaya untuk menjadikan sebuah pekerjaan itu sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, meskipun dalam teorinya seharusnya bersifat ketat namun dalam praktiknya hal tersebut bisa saja diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi yang dari awal tidak sesuai. Spesifikasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kualitas minimum calon tenaga kependidikan/pegawai yang akan diterima. Untuk inilah sering diadakan adanya pelatihan dan pendidikan baik yang bersifat khusus, umum dan lain sebagainya.
4. Persyaratan pekerjaan (*job recruitment*). kegiatan ini merupakan proses perekrutan terhadap tenaga kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah/madrasah atau sebuah organisasi pendidikan lainnya. Hal yang terpenting dalam hal ini adalah analisis pekerjaan (*job analysis*) dan analisis jabatan. Untuk lebih detailnya pada kedua aspek tersebut penulis deskripsikan sebagai berikut: Analisis pekerjaan (*Job Analysis*). Agar pengadaan tenaga betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus dilakukan analisis pekerjaan, baik melalui analisis proses maupun operasionalnya. Analisis proses dilakukan untuk menemukan jenis pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di sekolah atau jabatan yang harus

ada di sekolah.

Setelah itu dilakukan analisis operasi untuk menemukan bagaimana setiap tugas tersebut harus dikerjakan dan kemampuan yang diperlukan oleh yang mengerjakan tugas atau mengemban jabatan tersebut. Job Analisis atau analisis kerja adalah upaya mengurai pekerjaan sehingga memperoleh keterangan rinci tentang pekerjaan tersebut yang kemudian dapat dipakai untuk menentukan kualifikasi personel yang diperlukan.

Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, dan memberikan layanan pemanfaatan bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Analisis jabatan ini meliputi tiga kegiatan berikut:

- a. Mengumpulkan data jabatan dan mengolahnya menjadi informasi jabatan
- b. Menyajikan informasi bagi program-program kelembagaan, ktenagaan, dan ketatalaksanaan.
- c. Memberikan layanan pemanfaatan informasi jabatan yang memerlukan.

Dalam kegiatan analisis jabatan tersebut, akan dihasilkan daftar tugas atau jabatan yang seharusnya dimiliki sekolah, uraian tugas setiap jabatan, dan prosedur bagaimana setiap tugas dikerjakan sebagai contoh melalui analisis jabatan akan diketahui jumlah jenis kualifikasi guru yang diperlukan sekolah. Jika hasil analisis pekerjaan dan analisis jabatan menunjukkan bahwa sekolah kekurangan tenaga, sekolah negeri tidak dapat merekrut sendiri, tetapi mengusulkan pengangkatan tenaga

baru kepada Dinas Pendidikan Nasional atau Kandepag dan selanjutnya akan diteruskan ke Kanwil Provinsi. Untuk sekolah swasta, prosedurnya sesuai yang berlaku di sekolah/yayasan yang dibinanya. Jika secara keseluruhan tenaga guru berlebih, tetapi ada satu atau beberapa pelajaran yang gurunya kurang, dapat juga menugaskan guru yang berlebih untuk mengikuti program pengembangan agar mampu mengajar mata pelajaran yang gurunya kurang sesuai dengan rumpun mata pelajaran.

Sebelum merencanakan perekrutan tenaga kependidikan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi ketenagaan. Inventarisasi tenaga kependidikan adalah suatu usaha pokok dalam bidang tenaga kependidikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh kekuatan/jumlah guru dalam jangka waktu tertentu dengan jalan mengadakan pencatatan dan pendaftaran potensi tenaga kependidikan secara tertentu dan teratur.

Dengan adanya gambaran tersebut dapat diadakan berbagai perbandingan sebagai berikut:

- (a) Antara jumlah murid-murid
- (b) Antara jumlah guru dalam tiap bidang studi dan bidang lainnya
- (c) Antara jumlah guru dengan pegawai tata usaha dan lain-lain.

Adapun isi laporan mengenai keadaan ketenagaan memuat antara lain:

- (1) Jumlah pegawai menurut jabatan
- (2) Pangkat, golongan yang terdapat dalam satu unit organisasi pendidikan.



#### **D. Pengelolaan Tenaga Pendidik/Kependidikan**

Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan rangkaian aktivitas yang integral, bersangkut-paut dengan masalah perencanaan, pengadaan, penempatan, penempatan, pembinaan atau pengembangan penilaian dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya. Adapun tujuan pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan, memotivasi, kreativitas untuk:

1. Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri.
2. Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan (belajar) peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis.
3. Menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization
4. Peningkatan produktivitas pendidikan sebagai panduan fungsi keefektifan, efisiensi, dan ekuitas.
5. Menjamin kelangsungan usaha-usaha kearah terwujudnya keseimbangan kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyeraskan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem organisasi pendidikan.
6. Mewujudkan kondisi dan iklim kerja sama organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan.

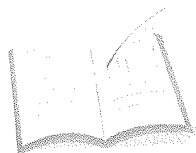
## Kesimpulan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan. Perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar berhasil yang dicapai sesuatu dengan yang diharapkan. Dengan perencanaan pula, berbagai langkah dalam mencapai tujuan juga ditetapkan sesuai dengan acuan dalam organisasi tersebut.

Banyak sekali hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kependidikan di antaranya Uraian pekerjaan (*job description*), Analisis pekerjaan (*job analysis*), Spesifikasi pekerjaan (*specification job*), Persyaratan pekerjaan (*job recruitment*).

# BAB 9

## PERENCANAAN INTERAKSI DUKATIF



**P**roses Pendidikan merupakan hubungan antara manusia dengan manusia yaitu guru dan siswa yang memerlukan perencanaan untuk mencapai hasil yang efektif dan maksimal. Perencanaan yang berperan terhadap interaksi antara stakeholder secara efektif dalam dunia pendidikan dikenal dengan interaksi edukatif, artinya bahwa dalam setiap pelaksanaan dan proses pendidikan mengharuskan adanya interaksi mutualisme dan kritis yang signifikan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dalam sebuah sekolah/ madrasah.

Untuk mengungkapkan makna dan hakikat interaksi edukatif, pada bagian ini akan dibahas mengenai interaksi.<sup>100</sup> Secara sederhana interaksi edukatif ini adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran dalam sebuah sekolah yang formal atau pun non formal. Konsep di atas, memunculkan istilah guru disuatu pihak dan anak didik dilain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi tugas, dan tanggungjawab yang berbeda,

---

100 Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 119.

namun bersama-sama mencapai tujuan.

#### **A. Landasan dan prinsip Perencanaan Interaksi edukatif**

Landasaninteraksi edukatif guru dengan siswa adalah suatu proses hubungan timbal balik (*feed-back*) yang sifatnya komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan, dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan serta memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian dalam interaksi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu antara guru dan siswa, oleh sebab itu diperlukan seorang guru yang mampu menciptakan interaksi edukatif yang kondusif supaya nantinya bisa membantu siswa untuk mencapai hasil belajar. Dalam melaksanakan kegiatan interaksi edukatif pada dasarnya tidak bisa dilakukan dengan gegabah dan di luar kesadaran kita, apalagi tidak adanya rencana tujuan, karena kegiatan interaksi edukatif merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru, atas dasar kesadaran itulah guru membuat rencana pengajaran dengan prosedur dan langkah-langkah yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada interaksi edukatif yang terjadi, juga dipengaruhi oleh cara guru dalam memahami perbedaan individual peserta didik, setiap interaksi edukatif yang terjadi dalam kelas merupakan interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa yang lainnya ketika proses belajar mengajar berlangsung.<sup>101</sup>

Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi atau hubungan, kalau dihubungkan dengan istilah interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal-balik antara pihak

---

101 Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 2.

yang satu dengan pihak yang lain, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai pengertian bersama yang kemudian untuk mencapai tujuan (dalam kegiatan belajar berarti untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Sadirman merinci ciri-ciri interaksi belajar-mengajar sebagai berikut:

1. Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi belajar-mengajar itu sadar tujuan, dengan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian. Siswa mempunyai tujuan, unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung.
2. Ada suatu prosedur ( jalannya interaksi) yang direncana, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu adanya prosedur, atau langkah-langkah sistematis dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain, mungkin akan dibutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. Sebagai contoh misalnya tujuan pembelajaran: agar siswa dapat menunjukkan letak kota new york, tentu kegiatannya tidak cocok kalau disuruh membaca dalam hati, dan begitu seterusnya.
3. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggapan materi yang khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Sudah barang tentu dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang lain, apalagi komponen anak didik yang merupakan sentral. Materi harus sudah didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi belajar-mengajar.

4. Ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Sebagai konsekuensi, bahwa siswa merupakan sentral maka aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar-mengajar. Aktivitas siswa dalam hal ini, baik secara fisik maupun secara mental aktif. Inilah yang sesuai dengan konsep CBSA. Jadi tidak ada gunanya guru melakukan kegiatan interaksi belajar-mengajar, kalau siswa hanya pasif saja. Sebab para siswalah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukan.
5. Dalam interaksi belajar-mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing ini, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar-mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru (“akan lebih baik bersama siswa”) sebagai designer akan memimpin terjadinya interaksi belajar-mengajar.
6. Di dalam interaksi belajar-mengajar dibutuhkan disiplin. Disiplin dalam interaksi belajar-mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditandai oleh semua pihak dengan secara sadar, baik pihak guru maupun pihak siswa. Mekanisme konkret dari ketaatan pada ketentuan atau tata tertib itu akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan. Penyimpangan dari prosedur, berarti suatu indikator pelanggaran disiplin.
7. Ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas (kelompok siswa), batas

waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu harus sudah tercapai.<sup>102</sup>

Dalam hal ini segala daya upaya belajar yang dilakukan seoptimal mungkin oleh siswa sangat menentukan kualitas interaksi edukatif yang terjadi di dalam kelas. Maka dari itu setiap kegiatan belajar mengajar bagaimanapun bentuknya sangat ditentukan oleh baik tidaknya program pengajaran yang telah direncanakan. Interaksi edukatif pada umumnya berada dalam ruang kelas dan guru mempunyai peranan yang penting, karena bagaimanapun baiknya sistem pendidikan serta media yang digunakan, pada akhirnya tergantung guru pula dalam memanfaatkan semua komponen tersebut.

Guru yang profesional dan kompeten akan lebih mampu menciptakan belajar yang efektif dan lebih mengelola kelas, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Metode dan keputusan guru dalam interaksi edukatif akan menentukan keberhasilan siswa yang berupa hasil belajarsiswa. Dalam berbagai statement dikatakan bahwa siswa dalam interaksi edukatif merupakan kelompok manusia yang belum dewasa dalam artian jasmani maupun rohani, oleh sebab itu memerlukan pembinaan, pembimbing dan pendidikan serta usaha orang lain yang dipandang sudah dewasa, agar siswa dapat mencapai kepada tingkat kedewasaan, perwujudan interaksi edukatif harus lebih banyak berbentuk pemberian motivasi dari guru kepada siswa, agar siswa merasa bergairah, semangat, potensi dan kemampuan yang dapat meningkatkan dalam dirinya sendiri.

---

Dalam Islam konsep interaksi edukatif yang disajikan  
102 Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* ( Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 15-17.

Alquran dengan berbagai kisahnya yang menyertainya secara umum mengarahkan kepada beberapa proses islamisasi antara lain: pembinaan akhlak, Humanisasi, dan pembentukan Insan kamil. Oleh sebab itu jelas bahwa landasan interaksi edukatif adalah berdasarkan Alquran dan Hadist.

Prinsip Dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif, dengan harapan mampu menjembatani dan memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif. Prinsip tersebut harus dikuasai oleh guru agar dapat tercapai tujuan pengajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Motivasi: Agar setiap anak dapat memiliki motivasi dalam belajar. Apabila anak didik telah memiliki motivasi dalam dirinya disebut motivasi intrinsik, Sangat memudahkan guru memberikan pelajaran, namun apabila anak tersebut tidak memilikinya, guru akan memberikan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri anak didik tersebut dan dapat berbentuk ganjaran, pujian, hadiah dan sebagainya.
- b. Prinsip Berangkat dari Persepsi yang Dimiliki: Bila ingin bahan pelajaran mudah dikuasai oleh sebagian atau seluruh anak, guru harus memperhatikan bahan apersepsi yang dibawa anak didik dari lingkungan kehidupan mereka. Penjelasan yang diberikan mengaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan anak didik akan memudahkan mereka menanggapi dan memahami pengalaman yang baru dan bahkan membuat anak didik memusatkan perhatiannya.
- c. Prinsip Mengarah kepada Titik Pusat Perhatian Tertentu atau Fokus Tertentu. Pelajaran yang direncanakan dalam



suatu pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah dan para anak didik akan sulit memusatkan perhatian. Titik pusat akan tercipta melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan masalah yang hendak dipecahkan
  - 2) Merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab
  - 3) Merumuskan konsep yang hendak ditemukan
  - 4) Membatasi keluasan dan kedalaman tujuan belajar serta
  - 5) Memberikan arah kepada tujuannya
- d. Prinsip Keterpaduan: Keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan akan membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi edukatif.
- e. Prinsip Pemecahan Masalah yang Dihadapi: Salah satu indikator kepandaian anak didik banyak ditemukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah belajar dan anak didik akan cepat tanggap dan kreatif.
- f. Prinsip Mencari, Menemukan dan Mengembangkan Sendiri: Guru yang bijaksana akan membuat dan memberikesempatan kepada anak didik untuk mencari dan menemukan sendiri informasi. Kepercayaan anak didik untuk selalu mencari dan menemukan sendiri informasi adalah pintu gerbang kearah CBSA yan gmerupakan konsep belajar mandiri yang bertujuan melahirk ananak didik yang aktif-kreatif.
- g. Prinsip Belajar Sambil Bekerja: Artinya belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil untuk anak didik sebab kesan yang didapatkan anak didik

- lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik.[6]
- h. Prinsip Hubungan Sosial: Hal ini untuk mendidik anak didik terbiasa bekerjasama dalam kebaikan. Kerjasama memberikan kesan bahwa kondisi sosialisasi juga diciptakan di kelas yang akan mengakrabkan hubungan anak didik dengan anak didik lainnya dalam belajar.
  - i. Prinsip Perbedaan Individual: Sudut pandang untuk melihat aspek perbedaan anak didik adalah segi biologis, intelektual dan psikologis. Semua perbedaan ini memudahkan guru melakukan pendekatan edukatif kepada setiap anak didik. Banyak kegagalan guru menuntaskan penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran salah satunya disebabkan karena guru gagal memahami sifat anak didik secara individual.

## B. Model interaksi edukatif

Menurut Djamarah Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu, wajarlah bila interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima oleh anak didik. <sup>103</sup>

Menurut Sardiman, interaksi edukatif memiliki ciri-ciri antara lain: a) Ada tujuan yang ingin dicapai; b) Ada bahan/

103 Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

pesan yang menjadi isi interaksi; c) Ada pelajar yang aktif mengalami; d) Ada guru yang melaksanakan e) Ada metode untuk mencapai tujuan; f) Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik; g) Ada penilaian terhadap hasil interaksi.<sup>104</sup>

Interaksi sebagai sebuah model dalam rangka menciptakan suasana pendidikan yang terkoneksi antara subjek pendidikan dan objek pendidikan yaitu guru dan siswa mengambil peran yang besar di dalam sebuah organisasi yaitu di dalam kelas dan di luar kelas. Adapun pola dan proses interaksi edukatif antara guru dan siswa di dalam kelas dapat disebut dengan metode dalam artian yang lebih sempit, meliputi metode-metode dalam pembelajaran.<sup>105</sup>

a. Metode ceramah. Di dalam kelas, secara umum ceramah menjadi metode yang sangat umum dilakukan dalam interaksi di dalam memasukkan nilai-nilai pendidikan dan pengetahuan pada diri siswa. Para pakar pendidikan Islam sepakat menyatakan bahwa metode Ceramah Metode ceramah merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran.

b. Metode Tanya Jawab; adalah interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan komunikasi verbal, yaitu dengan memberikan siswa pertanyaan untuk dijawab, di samping itu juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru.

---

104 Sardiman, *Interaksi belajar*, h. 13.

105 Djamarah., *Metode Pembelajaran* (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 70.

- c. Metode Diskusi atau Metode Musyawarah; Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan untuk diselesaikan bersama-sama. Sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat, informasi, maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru.
- d. Metode Demonstrasi atau Eksperimen; Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa metode demonstrasi digunakan untuk memperagakan tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari dengan tujuan menyajikan pelajaran dengan lebih konkret sehingga materi pelajaran yang disampaikan akan lebih berkesan bagi siswa dan membentuk pemahaman yang mendalam dan sempurna.
- e. Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.
- f. Metode Sosiodrama dan Bermain Peranan (Role Playing Method) Istilah sosiodrama dan bermain peranan (role playing) dalam metode Merupakan dua istilah yang kembar, bahkan di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan dan silih berganti. Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan jalan

mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini sebagai berikut:

- g. Metode psikodrama; Istilah psikodrama adalah tehnik bermain peran guna upaya pemecahan masalah psikis yang dialami oleh individu dan dituangkan dalam bentuk permainan peran dengan menggunakan metode drama. Psikodrama yaitu suatu cara mengeksplorasi jiwa manusia melalui aksi dramatik artinya memainkan sebuah peran tetapi tidak bersungguh-sungguh.<sup>106</sup>

### C. Rancangan Model Interaksi Edukatif

Konsep interaksi edukatif perspektif Alquran mulai dari sajian tujuan pembelajaran, materi pendidikan, kompetensi pendidik, etika anak didik dan metodenya semuanya sudah diimplementasikan pada pendidikan dan pembelajaran pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, benar bahwa interaksi yang dibangun antara pendidik dan peserta didik sangat diperlukan terkait urgensinya dalam keberhasilan proses belajar-mengajar. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.

Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Dengan adanya interaksi yang

106 Djamarah, *Metode Pembelajaran* (Jakarta. Rineka Cipta, 2000), h 23-30.

baik, berarti telah menjalin relasi antara pendidik dan peserta didik yang baik, sehingga peserta didik timbul rasa senang dan nyaman dalam proses belajar mengajar dan akan memberikan rasa tertarik terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran ini akan meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, dan bukan hanya itu murid akan mampu memahami proses sosial dengan teman-temannya ataupun dengan pendidik.

Dalam pembelajaran, interaksi pendidik dengan peserta didik terdapat model atau pola interaksi, dimana model atau pola interaksi ini terdiri atas tiga model, yaitu:

- a. Pola interaksi satu arah Pengajaran adalah transfer pengetahuan kepada siswa. Dalam bentuk ini guru mengajar disekolah hanya menyuapi makanan kepada anak, sementara siswa selalu menerima makanan itu tanpa memberi timbal balik, pasif dalam berpikir.
- b. Pola interaksi dua arah Pola interaksi dua arah merupakan proses mengajar siswa bagaimana cara belajar. Dalam pola ini guru hanya merupakan salah satu sumber belajar, bukan sekedar menyuapi materi kepada siswa. Pendapat ini dipengaruhi oleh perkembangan psikologi dari pengajaran modern yang menyatakan bahwa mengajar adalah melatih siswa untuk belajar.
- c. Pola interaksi Multi arah; Dalam interaksi Multi arah, pengajaran adalah hubungan interaksi antara guru dan siswa, dimana interaksi bukan hanya sekedar aksi dan reaksi, melainkan adanya hubungan interaktif tiap individu. Masing-masing individu berperan aktif, sementara guru menciptakan situasi dan kondisi agar individu dapat aktif dalam belajar. Dengan demikian akan timbul suasana atau

proses mengajar yang aktif.

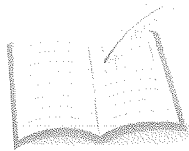
## **Kesimpulan**

Interaksi edukatif guru dengan siswa adalah suatu proses hubungan timbal balik (feed-back) yang sifatnya komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan, dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan serta memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian dalam interaksi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu antara guru dan siswa, oleh sebab itu diperlukan seorang guru yang mampu menciptakan interaksi edukatif yang kondusif supaya nantinya bisa membantu siswa untuk mencapai hasil belajar. Dalam melaksanakan kegiatan interaksi edukatif pada dasarnya tidak bisa dilakukan dengan gegabah dan diluar kesadaran kita, apalagi tidak adanya rencana tujuan, karena kegiatan interaksi edukatif merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru, atas dasar kesadaran itulah guru membuat rencana pengajaran dengan prosedur dan langkah-langkah yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dengan landasan Alquran dan Hadist sebagai pedoman dalam belajar mengajar dan berbagai prinsip dan model dalam merencanakan interaksi edukatif dalam Pendidikan.

# BAB 10

## PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA



**D**unia pendidikan semakin berkembang dengan berbagai metode serta strategi terlebih setelah Covid 19. sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi dan informasi menjadi daya pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan semisal Madrasah dan pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, Madrasah memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menunjang proses pendidikan di sekolah. Namun sayangnya, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Tingkat kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana ini tidak dapat dipertahankan secara terus menerus. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pengelolaan sarana dan prasarana secara baik agar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lama. Maka dari itu pentingnya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan.



## A. Konsep Sarana Prasarana

Dalam Kamus Besar (KBBI), sarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya”.<sup>107</sup> Daryanto mengatakan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.<sup>108</sup>

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam adalah kegiatan perencanaan upaya pengadaan, sewa pinjam, penggantian, daur ulang, perbaikan, penyebaran atau produksi peralatan dan perlengkapan yang selaras dengan kebutuhan.<sup>109</sup>

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran disekolah. Keberhasilan program pendidikan disekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh

---

107 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), edisi Ke3, h. 652.

108 Daryanto, *Administrasi Pendidikan* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 13.

109 Imam dan Djum Djum, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 320.

optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.<sup>110</sup>

Dalam fungsinya prasarana merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dan sebagainya. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu:

- a. Bangunan dan perabot sekolah
- b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium.
- c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran. Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru (dan murid) untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

Jadi Pentingnya sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XII pasal 45: 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,

<sup>110</sup> Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 2.

social, emosional, dan kewajiban peserta didik. 2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>111</sup>

Selain itu pada peraturan pemerintahan RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: prabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Dan setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, dan tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yan teratur dan berkelanjutan.<sup>112</sup>

Perbedaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk “memudahkan penyampaian/mempelajari materi pelajaran,” sedangkan prasarana pendidikan untuk “memudahkan penyelenggaraan pendidikan.” Dalam makna inilah sebutan “digunakan langsung” dan “digunakan tidak langsung” dalam proses pendidikan seperti telah disinggung di muka dimaksudkan. Jelasnya, disebut “langsung” itu terkait dengan penyampaian materi (mengajarkan materi pelajaran), atau mempelajari pelajaran. Papan tulis, misalnya, digunakan

---

111 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

112 Peraturan Pemerintahan RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

langsung ketika guru mengajar (di papan tulis itu guru menuliskan pelajaran). Meja murid tentu tidak digunakan murid untuk menulis pelajaran, melainkan untuk “alas” murid menuliskan pelajaran (yang dituliskan di buku tulis; buku tulis itulah yang digunakan langsung).<sup>113</sup>

Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan, yaitu: a) untuk menghindari terjadinya, kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; dan b) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan SARPRAS yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuatu dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga maupun sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>114</sup>

## B. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Dalam usaha pengadaan barang, Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa harus direncanakan dengan hati-hati agar pengadaannya sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>115</sup>

---

113 E.Mulyasa *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 34.

114 Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 2

115 Suharsimi Arikunto. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CVRajawali, 1992) h.7,

Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran, dapat melalui tahap-tahap sebagaimana sebagai berikut:

- a) Mengadakan analisis tahapan materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaianya. Dari analisis materi ini, dapat didaftar alat-alat atau media apa yang dibutuhkan. Ini dilakukan oleh dosen pengampu/guru bidang studi.
- b) Apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melalui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Kebutuhan yang lain dapat dipenuhi pada kesempatan yang lain.
- c) Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada perlu di lihat kembali, lalu mengadakan re-inventarisasi. Alat yang perlu diperbaiki atau diubah diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki.
- d) Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak.<sup>116</sup>

Dalam hubungan sarana pendidikan mengklasifikasi-kannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, seperti yang ditinjau dari: *Pertama*, Habis tidaknya dipakai meliputi dua jenis, yaitu a) Sarana pendidikan yang dipakai, ialah segala bahan maupun alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia yang sering digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Contoh diatas merupakan sarana yang digunakan habis pakai. b) Sarana pendidikan yang tahan lama,

---

116 *Ibid.*, h. 20.

ialah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama, contohnya seperti bangku sekolah, mesin tulis, globe, atlas, dan beberapa peralatan olahraga

Kedua, ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya, jenis ini juga bisa dalam bentuk: a) Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari arsip sekolah/madrasah dan juga bangku sekolah, merupakan sarana yang bisa digerakkan atau dapat dipindah kemana saja. b) Sarana pendidikan yang tidak bisa digerakkan, ialah sarana pendidikan yang tidak bisa atau sangat sulit untuk dipindahkan, misal sekolah yang memiliki saluran PDAM (perusahaan daerah air minum), semua peralatan yang berkaitan seperti pipa relatif tidak mudah untuk dipindahkan. c) Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar.

Berkaitan dengan kegunaannya ada dua jenis sarana pendidikan. 1) Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar contohnya, kapur tulis yang digunakan guru dalam mengajar. 2) Sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar contohnya, lemari arsip yaitu merupakan sarana pendidikan yang tidak secara langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.<sup>117</sup>

### C. Proses Perencanaan dan Penghapusan Perencanaan

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan

<sup>117</sup> Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, cet VIII, 2014), h. 51.

dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas dan guru-guru bidang studi dan dibantu oleh staf sarana dan prasarana. Dalam kegiatan perencanaan ada beberapa prosedur yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan analisis materi dan alat/media yang dibutuhkan
2. Seleksi terhadap alat yang masih dapat dimanfaatkan
3. Mencari dan/atau menetapkan dana
4. Menunjuk seseorang yang akan diserahkan untuk mengadakan alat dengan pertimbangan keahlian dan kejuruan.

Selain itu terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengadaan barang harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas, kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada:
  - (1) Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai, penyusunan perkiraan biaya/harga keperluan pengadaan.
  - (2) Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan
  - (3) Petugas Pelaksanaan
  - (4) Bahan dan peralatan yang dibutuhkan
  - (5) Kapan dan dimana kegiatan akan dilaksanakan
  - (6) Bahwa suatu perencanaan harus realistis, yaitu dapat dilaksanakan dengan jelas, terprogram, sistematis, sederhana, luwes, fleksibel, dan dapat dilaksanakan.
  - (7) Rencana harus sistematis dan terpadu.

- (8) Rencana harus menunjukkan unsur-unsur insani ataupun non insani yang baik.
- (9) Memiliki struktur berdasarkan analisis.
- (10) Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak perencana.
- (11) Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka.
- (12) Dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
- (13) Menunjukkan skala prioritas.
- (14) Disesuaikan dengan flapon anggaran.
- (15) Mengacu dan berpedoman pada kebutuhan dan tujuan yang logis.
- (16) Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun).<sup>118</sup>

Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian. Pembelian merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan sekolah pembayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau penyalur untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembelian dilakukan apabila anggarannya tersedia, seperti pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, wireless, dan sebagainya, pengadaan sarana dan prasarana dengan cara yang dominan dilakukan sekolah dewasa ini.

---

118 Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*, h. 10-12.



- 2) Pembuatan sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efensiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap tahapan sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah, misalnya alat-alat peraga yang dibuat oleh guru dan peserta didik.
- 3) Penerimaan Hibah atau Bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara.
- 4) Penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer.
- 5) Pinjaman. Pinjaman merupakan penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer dan harus mempertimbangkan citra baik

sekolah yang bersangkutan.

- 6) Pendaaur-ulang. Pendaaur-ulang adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang suda tidak terpakai menjadi barang yang berguna kepentingan sekolah.<sup>119</sup>

#### D. Penghapusan

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan bertujuan untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak.
2. Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak berguna lagi.
3. Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan.
4. Meringankan beban inventaris.

Kepala sekolah/madrasah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Demikian pula prosedurnya harus mengikuti peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Barang-barang yang memenuhi syarat untuk dihapus adalah:

- a. Barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak

119 E.Mulyasa, *Manajemen*, h 87-88

- dapat dimanfaatkan.
- b. Barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan
  - c. Barang-barang kuno yang penggunaannya sudah tidak efisien lagi.
  - d. Barang-barang yang terkena larangan.
  - e. Barang-barang yang mengalami penyusutan diluar kekuasaan pengurus.
  - f. Barang-barang yang pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya.
  - g. Barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi.
  - h. Barang-barang yang dicuri.
  - i. Barang-barang yang diselewengkan.
  - j. Barng-barang yang terbakar dan musnah akibat bencana alam.
  - k. Perbaikan suatu barang yang memerlukan biaya besar.
  - l. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan.
  - m. Jenis dan bentuk Manajemen sarana dan prasarana pendidikan.<sup>120</sup>

#### **E. Rancangan Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana**

Rancangan ini adalah pelemeliharaaan terhadap sarana prasanara yang dimiliki oleh sekolah/madrasah. Sebagaimana dinyatakan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam PBM.], maka pemeliharaan

---

120 *Ibid.*

sarana prasarana itu sangat penting.

Dalam pemeliharaan, ada empat macam pemeliharaan apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu: (1) pemeliharaan yang bersifat pengecekan; (2) bersifat pencegahan; (3) bersifat perbaikan ringan; (4) bersifat perbaikan berat apabila ditinjau dari waktu perbaikannya, ada dua macam, yaitu: (a) pemeliharaan sehari-hari (menyapu, mengepel lantai, dan sebagainya), (b) pemeliharaan berkala (pengontrolan genting, pengapuran tembok, dan sebagainya), kegiatan pemeliharaan dilakukan agar setiap sarana dan prasarana pendidikan selalu siap pakai dalam proses/kegiatan belajar mengajar (KBM).<sup>121</sup>

Rancangan perencanaan sarana prasarana dapat berjalan dengan baik seharusnya melalui tahap tertentu yaitu:

- a) Mengadakan analisis terhadap materi pembelajaran mana yang dibutuhkan alat/media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat didaftar alat/media apa yang dibutuhkan, hal ini dilakukan oleh guru bidang studi.
- b) Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Kebutuhan lain dapat terpenuhi dengan kesempatan lain.
- c) Mengadakan inventarisasi terhadap alat ataupun media yang telah ada. Alat yang sudah ada ini perlu dilihat kembali lalu mengadakan reinventrasi. alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki.
- d) Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran/media yang masih dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan reparasi

121 Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 8.

atau modifikasi maupun tidak.

- e) Mencari dana bila belum ada. Kegiatan dalam tahap ini yaitu mengadakan tentang bagaimana memperoleh dana, baik dari dana rutin maupun non rutin. Jika sekolah sudah mengajukan usulan kepada pemerintah dan skolahnya sudah keluar maka prosedur ini tinggal menyelesaikan pengadaan macam alat/media yang dibutuhkan sesuai dengan besarnya pembiayaan yang disetujui.
- f) Menunjuk seseorang (bagian pembekalan) untuk melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan ini sebaiknya mengingat tentang hal; keahlian, kelincahan, berkomunikasi, kejujuran, dan tidak hanya satu orang.<sup>122</sup>

Perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan adanya analisis kebutuhan dan pembuatan rencana kebutuhan. Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada 5 tahap yaitu: a. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran yang mana membutuhkan alat/media dalam menyampaikannya dan kemudian dibuatkan daftar kebutuhan alat-alat media b. Mengadakan perhitungan perkiraan biaya c. Menyusun prioritas kebutuhan d. Menunda pengadaan alat untuk perencanaan tahun berikutnya e. Menugaskan kepada staff untuk melaksanakan pengadaan.<sup>123</sup>

Kesimpulannya bahwa Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama

122 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2008), h 275.

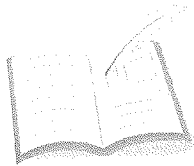
123 Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: 2007), h 13

dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, hal ini disebut dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan proses kerja sama dalam mengatur, mengelola, dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Satu hal yang perlu dipertegas dalam hal ini bahwasanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu terdiri dari perencanaan, dan penghapusan. Dengan semua kegiatan ini maka diharapkan perawatan terhadap sarana dan prasarana dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga bisa dapat meminimalisir biaya. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar dan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar.

# BAB 11

## PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN



**U**ngkapan *money is not everything but everything without it is nothing*, uang bukanlah segalanya tetapi tanpa uang segala sesuatu menjadi tidak ada apa-apanya, merupakan point penting dalam pembahasan mengenai perencanaan biaya pendidikan. Suatu lembaga pendidikan Islam meskipun memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia kalau tidak memiliki *dirham* merujuk ungkapan imam asy-Syafi'i menjadi kurang berkualitas bahkan akan hilang dengan sendirinya. Karena adanya uang menjadi bensin atau bahan bakar dalam rangka melaksanakan proses pendidikan itu sendiri seperti untuk biaya rekrutmen, penempatan, penggajian, pendidikan dan latihan, serta mutasi, pengadaan sarana dan prasarana. Lalu bagaimana seharusnya perencanaan pendidikan itu dilakukan dalam lembaga pendidikan Islam?

Secara sederhana perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, dan membuat rekomendasi

alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>124</sup> Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu biaya, perlu dana, paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan minimal. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidik sangat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

#### A. Pengertian Perencanaan Biaya Pendidikan

Perencanaan biaya pendidikan berkaitan erat dengan dasar administrasi dan manajemen pembiayaan. Adanya manajemen yang baik dalam dunia pendidikan menjadi salah satu aspek utama dalam pendidikan salah satunya adalah mengelola pembiayaan pendidikan.<sup>125</sup> Hal ini perlu mendapat kajian tersendiri mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan

---

124 E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. . 2002), h. 29.

125 Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta:Rosdakarya, 2012), h. 12.



mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian.<sup>126</sup>

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya sedemikian rupa dalam peningkatan mutu pendidikan misalnya melalui pembiayaan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sebagainya, bahkan yang terakhir adalah program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Berbagai peraturan dan kebijakan juga telah dibuat sedemikian rupa guna peningkatan mutu pendidikan.<sup>127</sup>

Perencanaan biaya pendidikan merupakan pengaturan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan dan masyarakat. Aktivitas pendidikan dapat dipilih

126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP).

127 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

dalam tiga bidang yaitu: aktivitas kegiatan belajar mengajar, aktivitas penelitian, dan aktivitas pengabdian masyarakat. Masing-masing dari aktivitas tersebut dapat dihitung total biaya, unit biaya maupun indikator prestasi terkait dengan biaya.<sup>128</sup>

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau *direct cost* dan tidak langsung atau *indirect cost*, biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupapembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.

Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran,

<sup>128</sup> Subarna, B. *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 27.

yaitu: Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi, Pembinaan teknis edukatif dan Pendataan.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Adapun konsep dasar pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut: *Pertama*; Konsep Penganggaran. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal:

- a. *Budgeting* (Penyusunan Anggaran). Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di

bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

b. *Accounting* (Pembukuan); Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan membayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

c. *Auditing* (Pemeriksaan). *Auditing* adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui bidang masing-masing.

*Kedua*, Faktor Internal, yaitu bahwa konsep dasar pembiayaan dipengaruhi oleh faktor dari luar lembaga pendidikan semisa Madrasah dan Pondok pesantren, antara

lain: a. Tujuan Pendidikan, sebagai salah satu contoh bahwa pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubah tujuan pendidikan kearah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. b. Pendekatan yang digunakan, strategi belajar-mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan metode lain dan pendekatan secara individual. c. Materi yang disajikan, materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian materi.

*Ketiga*, dipengaruhi oleh tingkat dan jenis pendidikan, dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya, biaya pendidikan di SD jauh berbeda dengan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.

## **B. Sumber Biaya Pendidikan**

Dalam Undang-undang 1945 pendidikan merupakan prioritas pembangunan manusia seutuhnya, oleh sebab itu amanah undang-undang memberikan jatah untuk pendidikan adalah 20 persen dari APBN terutama setelah era reformasi. Pada era reormasi muncul kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan gratis membuat sekolah/madrsah tidak perlu lagi memikirkan tentang menghimpun dana dari

orang tua dan masyarakat tetapi di sisi lain menjadi gamang bagaimana mengembangkan program pendidikan sesuai keinginan masyarakat sebagai customer.<sup>129</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, sekolah (pemerintah/ negeri) tidak diperkenankan melakukan pungutan terhadap siswa. Meskipun memiliki aturan yang berbeda, sekolah swasta maupun negeri membutuhkan strategi perencanaan pembiayaan yang tepat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan mutu sekolah.<sup>130</sup>

Sekolah yang memiliki input siswa yang kurang baik secara jumlah, akademis dan non akademis biasanya tidak terlalu terbebani dengan peningkatan mutu. Berbeda dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak dan hampir semua siswa memiliki kemampuan akademik dan atau non akademik yang cemerlang. Sekolah dapat menentukan strategi perencanaan pembiayaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sekolah termasuk kebutuhan siswa. Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Secara rinci, sumber pembiayaan sekolah/madrasah berasal dari:

- a. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD

---

129 Subarna, *Manajemen*, 2014: 81,

130 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dan sebagainya.

- b. Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
- c. Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dan sebagainya.
- d. Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat adalah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.
- e. Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat.<sup>131</sup> Bantuan tersebut berasal

---

131 Sembiring, F, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Kontemporer: Prinsip Dasar, Administrasi dan Operasional*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2020), h. 30-31.

dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Di antaranya adalah bantuan yang berasal dari luar negeri. Jenis-jenis biaya tersebut yaitu:

- (1) Biaya langsung (*direct cost*) merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.
- (2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*) merupakan keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Istilah lain yang berkenaan dengan dua sisi anggaran yakni penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh rutin setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi. Anggaran dasar pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap akhir tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di Sekolah.<sup>132</sup>

### C. Manajemen Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan merupakan sebuah aktifitas manajemen yang menyangkut juga di dalamnya adalah fungsi dari manajemen itu sendiri. Terkait dengan perencanaan pembiayaan pendidikan, harus diakui bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan berbeda dengan manajemen perusahaan yang lebih berorientasi kepada profit atau laba sedangkan dalam pendidikan lebih pada non profit oriented atau nirlaba. Pengelolaan biaya pendidikan yang dilakukan

132 Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h. 34.



dengan tepat tentu akan mempermudah kelangsungan proses pendidikan.

Perencanaan pembiayaan pendidikan juga dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*) sehingga secara spesifik manajemen pembiayaan pendidikan Islam memiliki Tujuan:

1. Untuk meramalkan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan. Salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan dengan baik adalah tersedianya dana atau biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan, dengan dana yang ada suatu lembaga pendidikan dapat mengefisinsikan apa yang menjadi tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.
2. Untuk melakukan proses pengelolaan keuangan dengan benar, tepat, akurat, sesuai yang dibutuhkan baik dilihat dari alokasi, penggunaan maupun mutu pendidikan yang diperoleh.
3. Untuk mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan kepercayaan warga sekolah atau madrasah, yang ada pada gilirannya dapat melahirkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program pendidikan.
4. Untuk menggambarkan seluruh kegiatan komponen system organisasi lembaga pendidikan serta meramalkan harga setiap kegiatan.
5. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah.

#### D. Evaluasi Rancangan Pengelolaan Biaya Pendidikan

Evaluasi atau yang sering disebut *evaluation involves auditing*, merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Cormark (1970) *auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.* Auditing merupakan salah satu cara pembuktian dan penentuan apakah penganggaran dan pengelolaan yang dimaksud telah sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Proses ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Setelah semua rencana penganggaran, pembuatan program prioritas, dan analisis sumber daya selesai, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah membuat rencana implementasi.

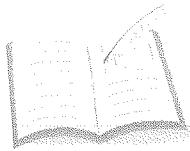
Khususnya rencana strategis mengenai *roadmap* jangka panjang anggaran dan finansial sekolah. Ini adalah langkah penerjemahan dari rencana strategis dan program yang sebelumnya dibuat. Oleh karena itu, akan fatal dampaknya bila kesalahan terjadi pada proses ini. Berikut beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam rencana biaya pendidikan yaitu:

1. Memastikan semua pihak mengerti dan memahami tujuan bersama serta misi yang ingin dicapai.
2. Menciptakan arah dan panduan dalam pembuatan keputusan.
3. Menetapkan fokus dan target penggalangan dana operasional.
4. Menetapkan jumlah dan nilai alokasi anggaran lebih spesifik serta berorientasi pada peluang di masa depan.
5. Mengevaluasi perangkat serta alat yang diperlukan untuk kegiatan dan event yang akan datang.
6. Membuat susunan tim dan organisasi yang efektif.

# BAB. 12

## PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM



**P**erencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para perencana mengambil bagian pada berbagai level pembuat keputusan mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya, bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui proses belajar-mengajar, dan tujuan tersebut memang tepat dan efektif.

### A. Pengertian Perencanaan Kurikulum

Hafied (2017: 32-33) mengungkapkan, untuk membuat sebuah perencanaan yang baik minimal diperlukan lima syarat, yakni: 1) Faktual dan realistis; Sebuah perencanaan yang disusun harus berdasarkan fakta. Apa yang akan dilakukan bisa direalisasi dalam bentuk nyata sehingga realistis. 2) Logis dan rasional; Perencanaan yang dibuat harus masuk akal untuk ditindaklanjuti. Demikian juga untuk target pencapaiannya harus terukur baik dari segi hasil maupun waktu. Sebuah perencanaan yang baik seharusnya dibuat dengan memerhatikan pikiran atau ide dari berbagai pihak. 3) Fleksibel; Sebuah rencana yang disusun tidak boleh

kaku. Perencanaan harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul dan menghambat pelaksanaan di lapangan. Fleksibel juga dapat diartikan keluasan untuk mempertimbangkan hal-hal yang kadang tidak terantisipasi sebelumnya. 4) Komitmen; Artinya bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu apa yang telah digariskan dalam perencanaan. 5) Komprehensif atau menyeluruh Perencanaan tidak hanya melihat secara parsial dari satu sisi saja, tapi harus terintegratif dengan bidang-bidang lainnya sehingga bisa diciptakan suatu proses pelaksanaan yang sinergis dan dinamis. Perencanaan terhadap kurikulum sebagai penopang dalam mensukseskan proses pendidikan merupakan bagian penting dalam proses terjadinya pendidikan, tanpa adanya kurikulum proses pendidikan akan terlihat tidak teratur, oleh karenanya kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan serta menjadi pedoman dalam dunia pendidikan terutama ketika kegiatan belajar mengajar (KBM) di dalam berbagai tingkat sekolah maupun madrasah.<sup>133</sup>

Bagaimana hakikat sebenarnya perencanaan kurikulum di sekolah yang terfokuskan terhadap materi bahan pembelajaran umum, serta bagaimana menggagas perencanaan kurikulum di lembaga sekolah. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurikulum merupakan satu rancangan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

---

133 Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), h. 39.

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>134</sup> Adapun di dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan perubahan perubahan kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum merupakan tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Standar Nasional Pendidikan itu sendiri memiliki beberapa komponen yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dikutip oleh Abdul Manab (2015: 87-90) perencanaan dan penyusunan kurikulum, harus memperhatikan struktur kurikulum, alokasi waktu, dan penetapan kalender akademik.

- 1) Struktur kurikulum pendidikan umum Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum satuan

---

<sup>134</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran.

- 2) Alokasi waktu Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
- 3) Penetapan kalender pendidikan Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan libur.

Berdasarkan ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa: a) Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. b) Hari libur madrasah/satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan atau organisasi penyelenggara

pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. c) Pemerintah Pusat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.

Pada awalnya, pengertian kurikulum lebih menitik beratkan pada isi pelajaran dalam arti beberapa pelajaran di instansi sekolah yang harus diikuti agar mendapatkan surat keterangan menyelesaikan studi, juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan.<sup>135</sup> Dan didalam hal lain, kurikulum dapat dijadikan ukuran kualitas proses dan keluaran pendidikan yang dijalankan. Dalam suatu kurikulum sekolah telah tergambar tentang berbagai hal pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan suatu sekolah. Akan tetapi, kurikulum bukanlah merupakan satu-satunya faktor penentu kualitas (keberhasilan) suatu sekolah. Masih terdapat berbagai factor lain yang turut menunjang kualitas atau keberhasilan kegiatan pendidikan yang dijalankan, seperti masalah sarana dan prasarana, situasi dan kondisi lingkungan, kualitas guru sebagai pelaksana pendidikan dan sebagainya. Sementara menurut Peter F. Olivia, Perencanaan kurikulum terjadi pada berbagai tingkatan. Para pegawai, staf kedisiplinan maupun staf guru dan yang lainnya ikut serta terlibat dalam perencanaan kurikulum, akan tetapi guru yang paling berpartisipasi dalam kurikulum. tingkat perencanaan dimana fungsi guru dapat dikonseptualisasikan sebagai sosok yang ditunjukkan.<sup>136</sup>

Dalam perencanaan kurikulum di sekolah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum di sekolah

---

135 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Bandung: Jemmars, 1982), h. 5.

136 Peter F. Olivia, *Development The Curriculum*, (New York: Pearso Education, Inc, 2004). 46-47



maupun di madrasah tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia.
2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dengan mempertimbangkan dan mengoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif dalam kerangka kerja yang komprehensif.
3. Perencanaan kurikulum harus bersifat antisipatif maupun reaktif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan siswa, agar membantu peserta didik menuju kehidupan yang baik.
4. tujuan-tujuan pendidikan selayaknya menekankan kepada kebutuhan di masyarakat.
5. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkrit, agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif.
6. Dalam perencanaan kurikulum, evaluasi secara kontinue terhadap keputusan yang sudah direncanakan terhadap kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum.;
7. Berbagai jenjang sekolah, dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. untuk itu, perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.<sup>137</sup>

Setelah mengetahui asas-asas dari perencanaan

---

137 Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 173-174.

kurikulum di sekolah selanjutnya adalah perlunya pimpinan di dalam menyusun perencanaan kurikulum dengan teliti, menyeluruh dan rinci, karena mengandung multi fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai alat manajemen dan pedoman, yang berisi sebagai petunjuk tentang jenis dan sumber yang dibutuhkan, media penyampaianya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenangan untuk mencapai tujuan manajemen.
2. Perencanaan kurikulum ialah sebagai penggerak roda dalam organisasi dan tata laksananya agar terciptanya perubahan di dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi itu tersendiri.
3. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivator untuk menjalankan sistem yang ada di dalam lembaga pendidikan sehingga mencapai hasil maksimal.<sup>138</sup>

Namun terciptanya suatu proses perencanaan kurikulum di sekolah yang efektif dan efisien tergantung bagaimana seorang *top leader* menggerakkan seluruh komponen yang ada. dapat diketahui bahwa fungsi utama pimpinan pada satuan pendidikan, seperti kepala sekolah adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam pelaksanaan tersebut, pimpinan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi lembaga pendidikan sehingga tercipta situasi belajar mengajar (*teaching learning*) yang baik dan melakukan supervisi

---

138 Oeamar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*.152.

yang nantinya kompetensi guru bertambah dan menjadi professional.

Seorang pemimpin harus selalu memperbaiki mutu pendidikan yang di dalamnya ada perencanaan kurikulum. Sesungguhnya, mutu pendidikan adalah factor kunci dalam kompetisi, baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional di era globalisasi ini. Mutu lulusan dan pelayanan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan, ditentukan oleh kompetensi manajerial, kepemimpinan, visi dan integritas kepribadian para manajer, guru-guru dan pegawai dalam mengelola pendidikan. Karena itu, tuntutan perbaikan mutu lembaga pendidikan perlu direspon dan dijadikan hal utama dalam penyusunan strategi lembaga pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan (demand) SDM unggul sebagai subjek pembangunan hari ini dan mendatang.<sup>139</sup>

Sumberdaya manusia merupakan instrument strategis untuk pengembangan kurikulum yang memiliki koherensi supaya pencapaian tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan sempurna melihat realitas kehidupan yang berkembang sangat pesat oleh karna itu perubahan atau pembaharuan kurikulum melihat perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>140</sup> Kurikulum mempunyai dua unsur, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang secara riil dapat

---

139 Zamroni Hasan Baharun, *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017). H. 34.

140 Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*.142

dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada (Wina Sanjaya, 2008: 22-24).

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pembelajaran berbasis aktivitas. Pelaksanaan kurikulum 2013 yang pada dasarnya merupakan pembelajaran berbasis tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, namun penilaian yang diambil berdasarkan muatan pembelajaran setiap mata pelajaran. Proses pemberlakuan kurikulum 2013 tersebut dilakukan secara bertahap karena untuk beralih dan menyesuaikan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi kurikulum 2013 juga membutuhkan waktu dan kesiapan yang cukup. Perubahan kurikulum 2013 pada proses sesuai dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah berisi kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Perubahan kurikulum 2013 pada penilaian sesuai dengan Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah berisi mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## **B. Model Perencanaan Kurikulum**

Menurut Stowe dalam kutipan Busro dan Siskandar (2017: 34), ada empat model perencanaan kurikulum berdasar asumsi rasionalitas, yaitu asumsi tentang

pemrosesan informasi secara cermat yang berkaitan dengan mata pelajaran, peserta didik, lingkungan, dan hasil belajar sebagai berikut:

1. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Tyler ; Model ini menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (goals dan objectives). Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuat keputusan, dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik.
2. Model interaktif rasional atau The Rational-Interactive Model. Model ini menitikberatkan pada “perencanaan dengan” (planning with) daripada “perencanaan bagi” (planning for). Perencanaan ini bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Model perencanaan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
3. The Diciplines Model. Model ini menitikberatkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Model ini dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematis tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis;
4. Model tanpa perencanaan atau non planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas, sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar dan sebagainya.

### C. Langkah-Langkah Perencanaan Kurikulum

Teguh Triwiyanto (2015: 96-97) menuliskan langkah-langkah perencanaan kurikulum sebagaimana dikutip dari Imron, sebagai berikut:

1. Prakiraan (forecasting); Prakiraan dalam perencanaan kurikulum berarti upaya untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan dengan berpijak pada saat ini dan menjadikan masa lalu sebagai cermin. Melalui prakiraan, kurikulum yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
2. Perumusan tujuan (objectives); Perumusan tujuan dalam perencanaan kurikulum merupakan harapan yang akan dicapai dari kurikulum yang direncanakan.
3. Kebijakan (policy); Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kurikulum yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia yang berdasarkan pada filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.
4. Langkah-langkah (procedure); Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
5. Pemrograman (programming); Pemrograman merupakan rancangan mengenai usaha untuk mencapai tujuan kurikulum.
6. Penjadwalan (schedule); Penjadwalan merupakan penentuan waktu dalam perencanaan kurikulum;
7. Pembiayaan (budgeting) Pembiayaan merupakan implikasi pendanaan dalam perencanaan kurikulum.

Dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 5-7) KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, Tuntutan dunia kerja, Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Agama, Dinamika perkembangan global, Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Kesetaraan jender, Karakteristik satuan pendidikan.

Menurut Oemar Hamalik (2006: 155-156) perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas objektivitas, keterpaduan, manfaat, kesesuaian, keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, mutu. Oemar Hamalik (2006: 154-155) mengemukakan bahwa suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat strategis, komprehensif, integratif, realistik, humanistik, futuristik, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematis, mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional, berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, desentralistik.

Menurut Oemar Hamalik (2012: 149-150) pendekatan perencanaan kurikulum yang bersifat “administrative approach” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi from the top down, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan.



# DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto, *Visi & Misi: Langkah Awal Menuju Strategic Management*, Cetakan II, Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2008.
- Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002.
- Aep Kusnawan, "Perencanaan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15 (Januari-Juni 2010).
- Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Akdon, *Strategis Managemen for Educational Management*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- AriefS.Sadiman,dkk.,*MediaPendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, Ed. I.
- Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*, Jakarta: PTRineka Cipta, 1996), Cet. I.

- Asnawirdan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. I.
- Azhar Arsyad, *Media Pengajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. II,
- B. Suryo Subroto, *Administrasi Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Bina Aksara, 1998), Cet. II.
- Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI*.
- Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Barnawi, *Buku Pintar Mengelola Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Conyers & Hills, *Creative Human Resource Planning and Applications: A Strategic Approach* (New York Prectice Hall, Inc, . 1994.
- Cynthia D. Scott, dkk., *Organizational Vission, and Mission*, terj. Ati Cahayani, *Visi, Nilai, dan Misi organisasi*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, cet VIII, 2014.
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dedi Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Na-

sional, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*, Jakarta: 2007

Direktur Jenderal Dikdasmen, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud, 2017.

Djamarah, *Metode Pembelajaran*, Jakarta. Rineka Cipta, 2000.

E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. VII.

Elfachmi, A. K. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Erlangga, 2016.

H. Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001.

H. Malayu SP Hasibuan, *Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Cet. I; , Magelang: Indonesiatera, 2003.

H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), Ed.2,.

Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017).

Hasan Langgulang, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2013).

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003.

\_\_\_\_\_, *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Cet. I.

Imam dan Djum Djum, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamaluddin Idris, *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*, Cetakan 1, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.

Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.

Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti. Cet. I.,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Kasmawati, "Implementasi Perencanaan Pendidikan dalam Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Idaarah*, Vol. III, No. 1 (Juni 2019), 140.

Martin, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Cet, I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013.

Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Jakarta:Rajawali Pres, 2016.

Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang, Erlang-

ga, 2007.

Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Rosdakarya, 2012.

\_\_\_\_\_, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cetakan ke-5.

Niken Ristianah, Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi di PAUD Darush Sholihin Tanjunganom Nganjuk, Jurnal INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam- Volume 2, Nomor 1, Oktober 2018, h.1-13. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/48/38>

Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 November 2015 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peter F. Olivia, *Development The Curriculum*, (New York: Pearson Education, Inc, 2004.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia,

2002,Cet. IV.

Richard L. Daft, *Era Baru Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, Ed Ke-9.

S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bandung : Jemmars, 1982.

---

, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Alquran*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats, tth.

Sembiring, F, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Kontemporer: Prinsip Dasar, Administrasi dan Operasional*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2020.

Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*,(Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta: 2010.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Sebagai Sebuah Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008.

Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Jakarta: PT Prenhalindo, 1999), Ed ke-6.

Subari, *Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, Cet. I.

Subarna, B. *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Deepublish,

2014.

Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), Cet. II.

\_\_\_\_\_, *Pengelolaan Materiil*, Jakarta: PTPrima Karya, 1987), Cet. I.

\_\_\_\_\_. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta : CVRajawali, 1992) h.7,

Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Management*, Yogyakarta: Bpfeyogyakarta, 1986, Ed-IV.

Susanto, *Pengembangan KTSP dengan Perspektif Manajemen Visi*, Cetakan 1, Surabaya: Matapena, 2007.

Suyitno, Y. *Landasan Filosofi Pendidikan* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009.

Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Syaiful Sagala, "Pengantar", *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta. 2013.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003.

- Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta, Univ. Prof. Dr. Moestopo Beragama Pers, 2008.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 200, Ed. Ke-3.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yatimah, *Landasan Pendidikan*, Jakarta: Alungadan Mandiri 2017.
- Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Zamroni Hasan Baharun, *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017.






Buku berjudul 'Perencanaan Pendidikan Islam dalam Teori' ini membahas tentang perencanaan pendidikan Islam yang disusun berdasarkan pendekatan saat ini terutama setelah pandemi Covid-19, sehingga pembahasan mengenai perencanaan pendidikan Islam memiliki rujukan yang akan dapat berguna bagi keberlangsungan pendidikan Islam yang berkualitas sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar dan tentunya tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, sehingga lembaga pendidikan Islam benar-benar menjadi lembaga yang terorganisir sesuai dengan fungsinya mengembangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan sehingga mencapai karakteristik yang diharapkan.

Buku ini terdiri atas 12 Bab yang masing-masing membahas terkait teori perencanaan dalam pendidikan Islam berdasarkan teori-teori yang berkembang baik dalam kerangka filosofis, yuridis, dan teoretis. Buku ini juga diharapkan menjadi buku rujukan yang akan ditulis dengan kerangka mendiagnosis yang lebih tersistematis.

**Penerbit**  
**Lutfi Gilang**  
Pancurendang, Ajibarang  
Panyumas, Jawa Tengah. 53163  
[www.lutfigilang.carrd.co](http://www.lutfigilang.carrd.co)

Pendidikan 13\*

ISBN 978-623-479-022-1



9 786234 790221

Harga P. Jawa Rp. 75.000,-